

LAPORAN KINERJA (LKJ)

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT **DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan Iradat dan kudratNya jumlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dapat diselesaikan pada waktunya. Laporan Kinerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan pencapaian konsep Rencana Pembangunan Jangka Meneganaah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan Isu Strategis, yaitu “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi” yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 s/d 2029.

Laporan Kinerja (LKj) dapat digunakan oleh setiap aparatur mulai dari staf sampai pimpinan puncak instansi atau unit kerja yang peduli dalam mengukur tingkat Indikator keberhasilan kinerja pada Instansi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Tanah Laut berupa komoditas Padi, Jagung, Kacang Tanah, Kedelai, Cabe, Durian, Bawang Merah, Karet, Sawit dan Kopi untuk meningkatkan PDRB Sektor Pertanian. Keberhasilan sektor pengembangan pertanian tersebut diatas akan sangat dipengaruhi arah Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal ini peran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, dukungan para penyuluh pertanian dan peran para kelompok tani.

Akhirnya dengan dukungan Pimpinan dan para Aparatur Sipil Negara Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, Laporan Kinerja yang dibuat tahun 2025 dapat memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan dalam peningkatan sektor produksi khususnya di Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Februari 2026

Kepala Dinas,



Iri M. Faried Widyatmoko

NIP.19680929 199503 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi SAKIP guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

Pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan urusan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut merupakan upaya untuk mewujudkan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 – 2025 yaitu 'Mewujudkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Bertumpu Pada Pembangunan Industri Berbasis Pertanian, Kelautan, Pertambangan dan Pariwisata.

Strategi pencapaian tujuan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut secara umum menyesuaikan dengan arah kebijakan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan Isu Strategis, yaitu "Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi".

Pembangunan Pertanian termasuk ke dalam Aspek pembangunan Ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, yang merupakan aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi serta memberikan layanan-layanan pemenuhan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan urusan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Renstra Tahun 2024-2026 berorientasi pada sasaran :

1. Rasio PDRB Sektor Pertanian.
2. Meningkatnya tata kelola administrasi umum, kepegawaian dan akuntabilitas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum	3
D. Cascading Kinerja	3
E. Proses Bisnis, Tugas Dan Fungsi Dan Struktur Organisasi	4
F. Isu Strategis Perangkat Daerah	12
G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran.....	13
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya 36	
I. Sistematika Penyajian	41
BAB II.....	42
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	42
A. Visi RPJMD	42
B. Misi RPJMD.....	43
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	44
D. Strategi dan Arah Kebijakan.....	46
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	47
BAB III.....	49
AKUNTABILITAS KINERJA	49
A. AKUNTABILITAS KINERJA	50
1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	50
2. Analisa Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan.....	50
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	99
BAB IV.....	103
PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Strategi Peningkatan Kinerja	103

LAMPIRAN.....	105
1. Capaian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural	106
2. Perjanjian Kinerja	109
3. SK Indikator Kinerja Utama	137
4. Rencana Aksi Tahun 2025	142
5. Pohon Kinerja.....	147
6. Cascading Kinerja	148
7. LHE AKIP Tahun 2025	149



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggung

jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. Maksud Dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
- e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
- c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan di masa yang akan datang

C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2026 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

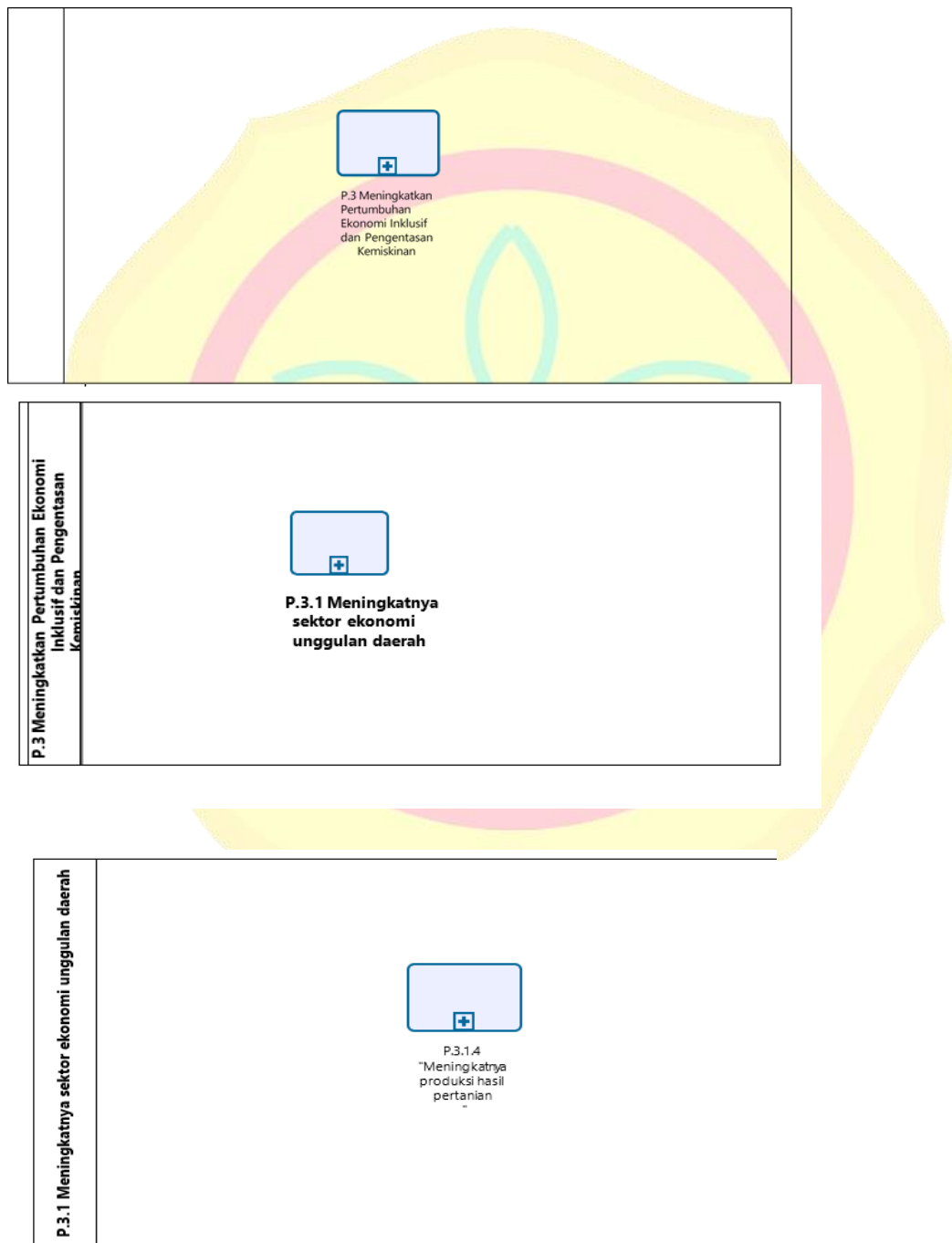
D. Cascading Kinerja

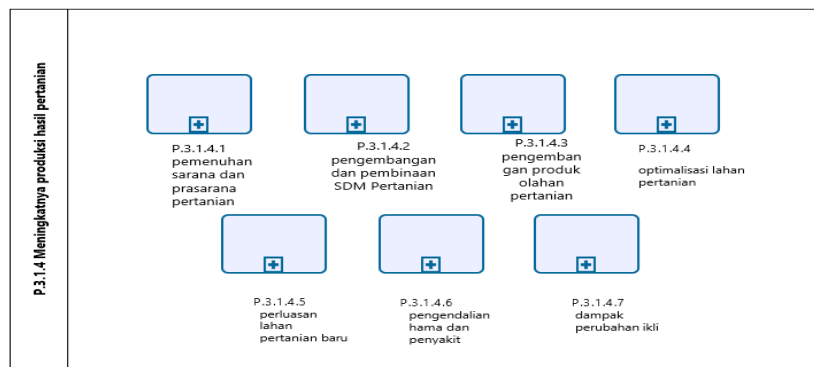
Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas Dan Fungsi Dan Struktur Organisasi

1) Proses Bisnis

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:



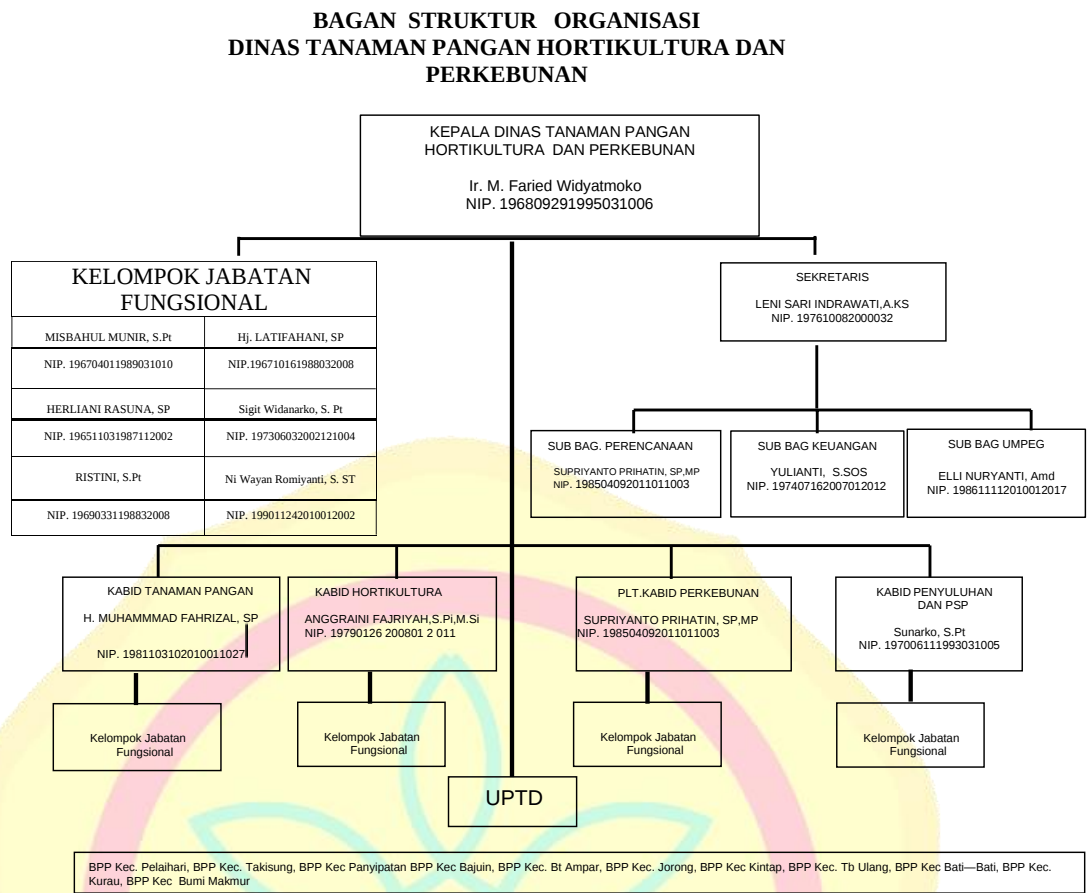


Gambar 1. Peta proses bisnis level 0-3 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam Bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang diberikan kepada Daerah. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut

Gambar 1.4
Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut



Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai penyelenggara penunjang pemerintahan bidang Bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang diberikan kepada Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, yakni:

1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam Bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang diberikan kepada Daerah.
 - a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas
- 5) pembinaan UPTD dinas
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

a. Sekretariat sebagaimana mempunyai tugas

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan

b. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- 2) pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- 3) pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- 4) penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- 5) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan
- 6) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang
- 7) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan
- 8) pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan

dokumentasi di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

9) pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan

10) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan

11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

6. Bidang Tanaman Pangan

a. Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan

b. Untuk melaksanakan tugas Bidang tanaman pangan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan Renja bidang tanaman pangan
- 2) perumusan kebijakan bidang tanaman pangan;
- 3) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang tanaman pangan;
- 4) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tanaman pangan;

- 5) pelaksanaan kebijakan perlindungan dan perbenihan tanaman pangan
- 6) pelaksanaan kebijakan produksi tanaman pangan;
- 7) pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemasaran tanaman pangan
- 8) pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 10) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

7. Bidang Hortikultura

- a. Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura.
- b. Untuk melaksanakan tugas Bidang hortikultura mempunyai fungsi:
 - 1) penyusunan Renja bidang hortikultura
 - 2) perumusan kebijakan bidang hortikultura
 - 3) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang hortikultura
 - 4) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang hortikultura
 - 5) pelaksanaan kebijakan perlindungan dan perbenih hortikultura
 - 6) pelaksanaan kebijakan produksi hortikultura
 - 7) pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemasaran hortikultura
 - 8) pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura
 - 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 10) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

8. Bidang Perkebunan

- a. Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan.
- b. Untuk melaksanakan tugas Bidang perkebunan mempunyai fungsi:
 - 1) penyusunan Renja bidang perkebunan
 - 2) perumusan kebijakan bidang perkebunan
 - 3) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perkebunan
 - 4) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perkebunan
 - 5) pelaksanaan kebijakan perlindungan dan perbenihan perkebunan
 - 6) pelaksanaan kebijakan produksi perkebunan;
 - 7) pelaksanaan kebijakan pengolahan dan pemasaran perkebunan
 - 8) pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan
 - 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 10) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

9. Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian

- a. Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan dan prasarana sarana pertanian.
- b. Untuk melaksanakan tugas Bidang penyuluhan dan prasarana sarana pertanian mempunyai fungsi:
 - 1) penyusunan Renja bidang penyuluhan dan prasarana sarana pertanian

- 2) perumusan kebijakan bidang penyuluhan dan prasarana sarana pertanian
- 3) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang penyuluhan dan prasarana sarana pertanian
- 4) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan dan prasarana sarana pertanian;
- 5) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian
- 6) pelaksanaan kebijakan pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan
- 7) pelaksanaan kebijakan pengelolaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian
- 8) pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan dan prasarana sarana pertanian
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 10) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Pusat kegiatan ekonomi berskala internasional melalui perdagangan dan jasa, pariwisata, industri, industri kelautan, pertanian, dan pengembangan pusat pelayanan yang terkoneksi antar Kawasan berbasis pembangunan yang berkelanjutan.	Potensi Pertanian tumbuh pesat, tetapi kontribusinya masih diperingkat dua	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Hijau	Krisis Pangan melanda dunia (Dinamika geopolitik dan geoekonomi)	Deindustrialisasi dini dan rendahnya produktivitas pertanian	Pembangunan ekonomi yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan diperkuat melalui interaksi antarwilayah.	Transformasi Ekonomi dengan : Potensi Pertanian dan Perkebunan (Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)
	Pertumbuhan ekonomi melambat			Cetak Sawah	Perekonomian masih bergantung pada sektor hulu, sementara hilirisasi dan diversifikasi industri berbasis	Terbatasnya Infrastruktur Lahan dan Air, seperti : Jaringan Irigasi, Bangunan Air dan Jalan Usaha Tani/Produksi
	Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani yang ada			Pencapaian swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya	Belum maksimal/terbatasnya kemampuan petani dalam menyerap transfer ilmu/teknologi pertanian.	Minat pemuda terhadap pertanian masih rendah

G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM)**, **sarana**, **prasarana**, dan **anggaran**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 107 orang yang terdiri dari 87 PNS, 3 PPPK penuh waktu dan 37 PPPK paruh waktu dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

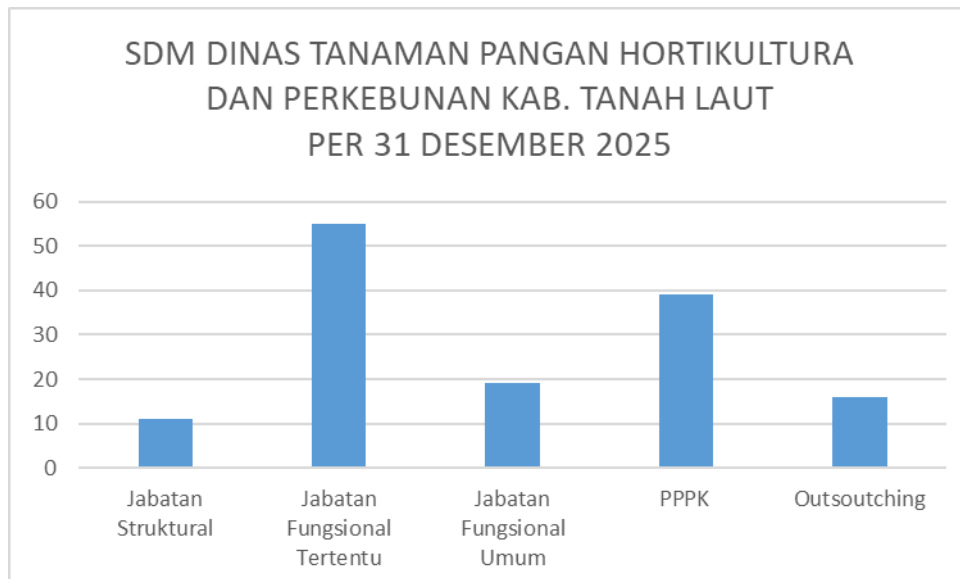
Tabel 1.1
Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK	Total	Pendidikan							Total
IV	III	II	I			S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
21	58	8	-	20	107	4	84	9	-	9	0	1	107

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Sekretariat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sesuai peta jabatan adalah 107 (seratus tujuh) orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 107 (seratus tujuh) orang. Terpenuhinya formasi pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu untuk mendukung tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dalam memberikan pelayanan prima serta mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.

Grafik 1.1

SDM Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut



Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 10 Pejabat struktural, 55 orang jabatan fungsional tertentu (JFT), 19 orang fungsional umum (JFU) dan 39 orang PPPK dengan jumlah keseluruhan 76 ,16 Tenaga outsourcing.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana 2730 unit peralatan , 118 unit gedung kantor dan bangunan. Sedangkan sarana transportasi terdiri 8 unit kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua 113 unit.

Program, dan Kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
1		3	4	5	6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				60.838.187.446,08		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		IKM Sekretariat Dintanhorbun	90	26.019.277.455,39		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran , dan	100%	15.094.111,89		

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanah laut	Jumlah dokumen	7 dokumen	7.998.360	swakelola	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanah laut	Jumlah Laporan	4 laporan	7.095.751,59	swakelola	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	22.404.680.186		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK	Tanah laut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	133 orang/bulan	22.396.681.826	swakelola	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tanah laut	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42 dokumen	7.998.360	swakelola	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	50.000.000		
	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tanah laut	Jumah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 orang	0	swakelola	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tanah laut	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	10 orang	50.000.000	swakelola	

			Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	760.819.272		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tanah laut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.995.968	swakelola	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanah laut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	6 Paket	276.579.190	swakelola	
			Disediakan				

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanah laut	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	19.997.813	swakelola	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanah laut	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	39.851.667	swakelola	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tanah laut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	3.960.000	swakelola	
	Penyediaan Bahan / Material	Tanah laut	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	17.999.634	swakelola	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanah laut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	380.435.000	swakelola	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	508.004.499		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanah laut	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	384.060.000	swakelola	
	Pengadaan Mebel	Tanah laut	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	54 unit	113.954.499	swakelola	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanah Laut	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	1 Unit	9.990.000	swakelola	
--	--	-----------------------	---	---------------	------------------	------------------	--

			Disediakan				
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanah laut	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	swakelola	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	1.655.659.652		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanah laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1.650.000	swakelola	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanah laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	286.000.000	swakelola	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanah laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.368.009.652	swakelola	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	637.706.490,03		

			Pemerintah Daerah				
--	--	--	-------------------	--	--	--	--

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tanah laut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	31.000.000	swakelola	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanah laut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	atau 98 unit	378.000.000	swakelola	

			Perizinannya				
	Pemeliharaan dan Peralatan Mesin Lainnya	Tanah laut	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 unit	39.860.000	swakelola	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tanah laut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	188.846.490,03	swakelola	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanah laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	0 unit	0	swakelola	

			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Pemenuhan sarana pertanian	20%	7.766.363.011,94		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Tanah Laut	Persentase capaian pengawasan penggunaan sarana pertanian	100%	7.569.968.114,26		

3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase pemenuhan prasarana pertanian tanaman pangan dan Hortikultura	35 %	21.812.822.640,41		
			Persentase pemenuhan prasarana pertanian tanaman perkebunan	10 %			
			Persentase pemenuhan prasarana pertanian	40 %			
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Tanah laut	Persentase capaian Pengembangan prasarana pertanian	100%	2.070.199.569,00		

	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Tanah laut	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	2 dokumen	2.057.289.569,00	swakelola	
	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Tanah laut	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 dokumen	12.910.000,00	PL	

	Pembangunan Prasarana Pertanian	Tanah laut	Persentase capaian pembangunan prasarana pertanian	100%	19.742.623.071,41		
--	--	-----------------------	---	-------------	--------------------------	--	--

	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Tanah laut	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3 unit	635.133.776,00	PL	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Tanah laut	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 unit	1.051.365.324,60	PL	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Tanah laut	Jalan Usaha Tani yang Dibangun,	98 unit	18.056.123.970,81	PL	

	Jalan Usaha Tani		Direhabilitasi dan Dipelihara				
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Luas Area Terdampak OPT dan DPI Yang Tertangani Pada Tanaman Pertanian	100%	848.372.553,54		
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Tanah laut	Persentase capaian Pengendalian dan Penanggulangan	100%	848.372.553,54		

			Bencana Pertanian				
--	--	--	------------------------------	--	--	--	--

	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tanah laut	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	60 Ha	470.498.756,54	swakelola	
--	---	-----------------------	---	--------------	-----------------------	------------------	--

	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Tanah laut	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	1.000 Ha	377.873.797,00	swakelola	
5	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasikan	100%	2.851.608.949,30		
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah	Tanah laut	Persentase capaian Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam	100%	2.851.608.949,30		

	Kabupaten/Kota		Daerah Kabupaten/Kota				
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Tanah laut	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 dokumen	2.851.608.949,30	swakelola	
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Luas Perkebunan Sawit Rakyat yang	2000 ha 16,2 %	1.262.005.197,00		
			Terdaftar Persentase Penyuluh				

			Pertanian Yang Terlatih				
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Tanah laut	Persentase Capaian Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	100%	1.262.005.197,00		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Tanah laut	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 unit	962.005.197,00	swakelola	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tanah laut	Jumlah Sarana dan	0 unit	0	swakelola	

			Prasarana Penyuluhan Pertanian				
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Tanah laut	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen	300.000.000	swakelola	

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

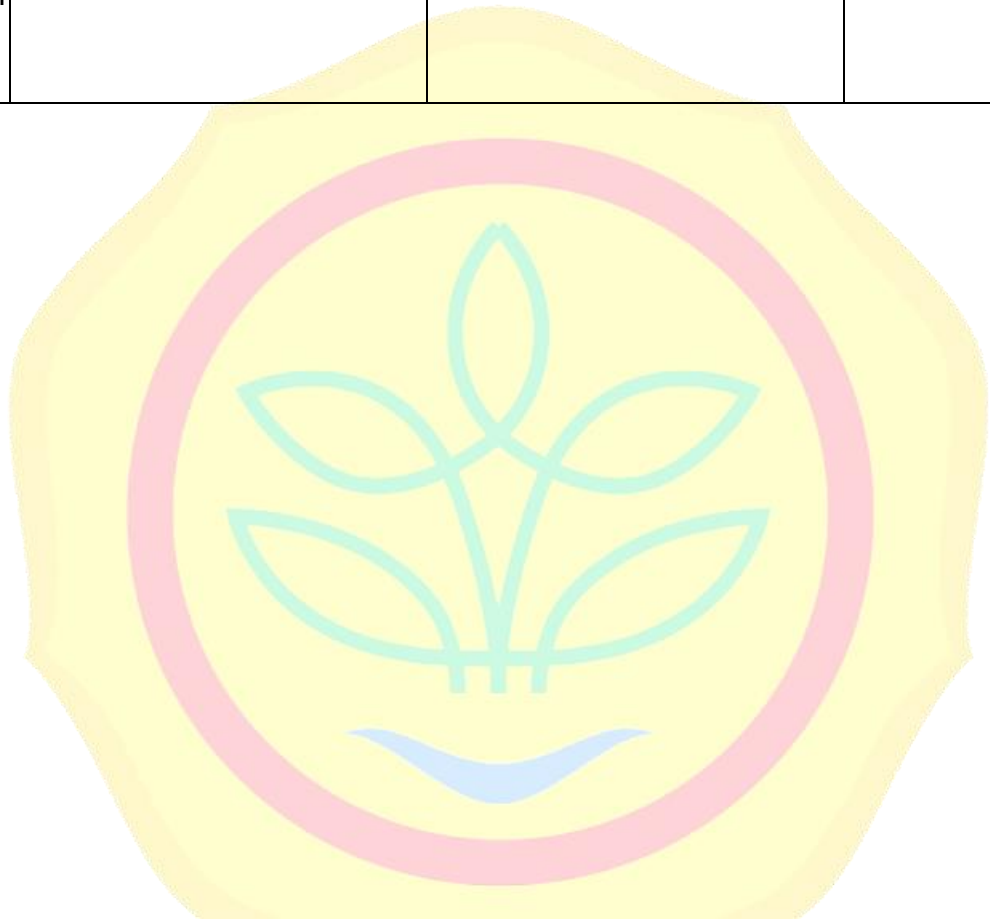
No	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Rencana Aksi	Status/ Progres Penyelesaian	Keterangan
A. Perencanaan Kinerja					
1	Penentuan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 belum mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu pada indikator kinerja nilai SAKIP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Tanah Laut.	Menyesuaikan target kinerja tahun berikutnya dengan kondisi dan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta analisis yang objektif agar target yang ditetapkan bersifat SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound). Selain itu, perlu dibangun mekanisme pengendalian internal agar tidak terjadi perbedaan angka target	Penyusunan Target Perjanjian Kinerja berdasarkan target yang ada di Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024 – 2026.	Selesai/Sesuai	

		pada dokumen yang berbeda untuk tahun yang sama;			
2	Target dan realisasi dari indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut tahun sebelumnya tidak menjadi acuan dalam penentuan target kinerja tahun berikutnya	Menyesuaikan target kinerja tahun berikutnya dengan kondisi dan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta analisis yang objektif agar target yang ditetapkan bersifat SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound).	Penyusunan Target dari indikator realisasi Kinerja berdasarkan target yang ada di Rencana Startegis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024 – 2026.	Selesai/Sesuai	
B. Pengukuran Kinerja					
1	Pemantauan pada kinerja menggunakan E – Kinerja namun pada implementasi dalam penilaian SKP	Melakukan pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan dengan memberikan umpan balik	Telah dilakukan pemantauankinerja bawahan oleh pimpinan dengan memberikan	Selesai/Sesuai	

	bulanan , umpan balik (feedback) dari pimpinan hanya berupa simbol “jempol” belum ada bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya. Hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar.	(feedback) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya;	umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi.		
2	Pemantauan Kinerja sebagai hanya menggambarkan besaran realisasi keuangan dan ketika ada perubahan rencana kerja tidak disertai alasan perubahannya dan belum sepenuhnya	Pemantuan Kinerja juga menggambarkan besaran realisasi fisik, dan ada penjelasan Ketika terjadi perubahan.	Telah dilaksanakan pemantauan kinerja dengan melampirkan kinerja keuangan dan fisik pada laporan triwulan.	Selesai/Sesuai	

	berdasarkan analisis capaian kinerja pertriwulan yang berpengaruh pada penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja				
C. Pelaporan Kinerja					
1	Laporan kinerja telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal ini terlihat pada Laporan Kinerja tahun 2024 indikator nilai SAKIP realisasi 81,95 nilai atau kategori A, sedangkan pda target PK tahun 2025 hanya	Laporan Kinerja berkala mapupun tahunan yang sudah disusun agar digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya.	Laporan Kinerja telah digunakan secara berkala mapupun tahunan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya	Selesai/Sesuai	

	menargetkan kategori predikat BB yang artinya lebih rendah dari capaian tahun 2024.				
--	---	--	--	--	--



I. Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan).

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan .

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun,
Maju, dan Berkelanjutan)”**

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan Isu Strategis, yaitu “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi”, dan menjadi acuan bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Rumusan Visi yang jelas diharapkan mampu : (a) meningkatkan pembangunan manusia, (b) menciptakan pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, serta (c) meningkatkan tata kelola pemerintahan agar menjadi lebih baik.

Visi Instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur Organisasi sehingga menjadi Visi bersama (*shared vision*) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber Organisasi.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah selalu memperhatikan keseimbangan pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah, sebagai satu kesatuan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik dan pemerintahan sehingga terwujud pembangunan yang terencana dan berkelanjutan, khususnya dalam sub sektor Pertanian dan Perkebunan.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 2 “Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas”.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan termasuk dalam mendukung tujuan kedua yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dengan sasaran Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah adalah Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan adalah Meningkatnya Produktivitas dan daya saing sektor unggulan daerah dan sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan adalah Meningkatnya kontribusi Komoditas Sub Sektor Pertanian.

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Produktivitas dan daya saing sektor unggulan daerah		Rasio PDRB sektor pertanian dan perikanan	16,45	16,47	16,5	16,6	16,7	16,75	16,76
	1.	Meningkatnya kontribusi Komoditas Sub Sektor Pertanian	Rasio PDRB Sub Sektor Pertanian	5	5	5,1	5,3	5,5	5,7	6

1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan untabilitas serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

No.	Sasaran Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Kontribusi PDRB Sub Sektor Pertanian	Rasio PDRB Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	$\text{PDRB Sektor Pertanian} = \frac{\text{Nilai Tambah Bruto Biaya Antara}}{\text{Biaya Antara}}$	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Produksi Pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Meningkatnya produksi hasil pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikulturan dan tanaman perkebunan)	Padi, Jagung, Kacang Tanah, Cabe, Bawang merah, Durian, Karet, Kelapa Sawit dan Kopi

NO	Wilayah	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Tanah Laut	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian dengan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana teknologi pertanian yang baik	
			Penanggulangan dan pengendalian bencana pertanian	
			Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluh dan Petani	

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (hanya eselon II)

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kontribusi Komoditas Sub Sektor Pertanian	1	Rasio PDRB Sub Sektor Pertanian	5%	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 1 sasaran di atas, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. 34.818.909.990,69.

Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Meningkatnya kontribusi Komoditas Sub Sektor Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.044.112.856,94
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	21.812.822.433,91
		Program Pengendalian dan Pennagulangan Bencana Pertanian	848.372.553,54
		Program Perizinan Pertanian	2.851.596.949,30
		Program Penyuluhan Pertanian	1.262.005.197,-
JUMLAH			34.818.909.990,69

Selain itu, terdapat Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menunjang kegiatan internal sekretariat sebesar Rp. 26.019.277.455,39, sehingga total anggaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sebanyak Rp. 60.838.187.446,08.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025-2029 terdapat 1 sasaran dengan 1 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU dari target 5% dengan realisasi 5,03%, yaitu telah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,6%.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 210 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya Produktivitas dan daya saing sektor unggulan daerah							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya kontribusi Komoditas Sub Sektor Pertanian	1	Rasio PDRB Sektor Pertanian	5%	5,03%	100,6%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025							

2. Analisa Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 1 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 1 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang **Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah** berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pengelompokkan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

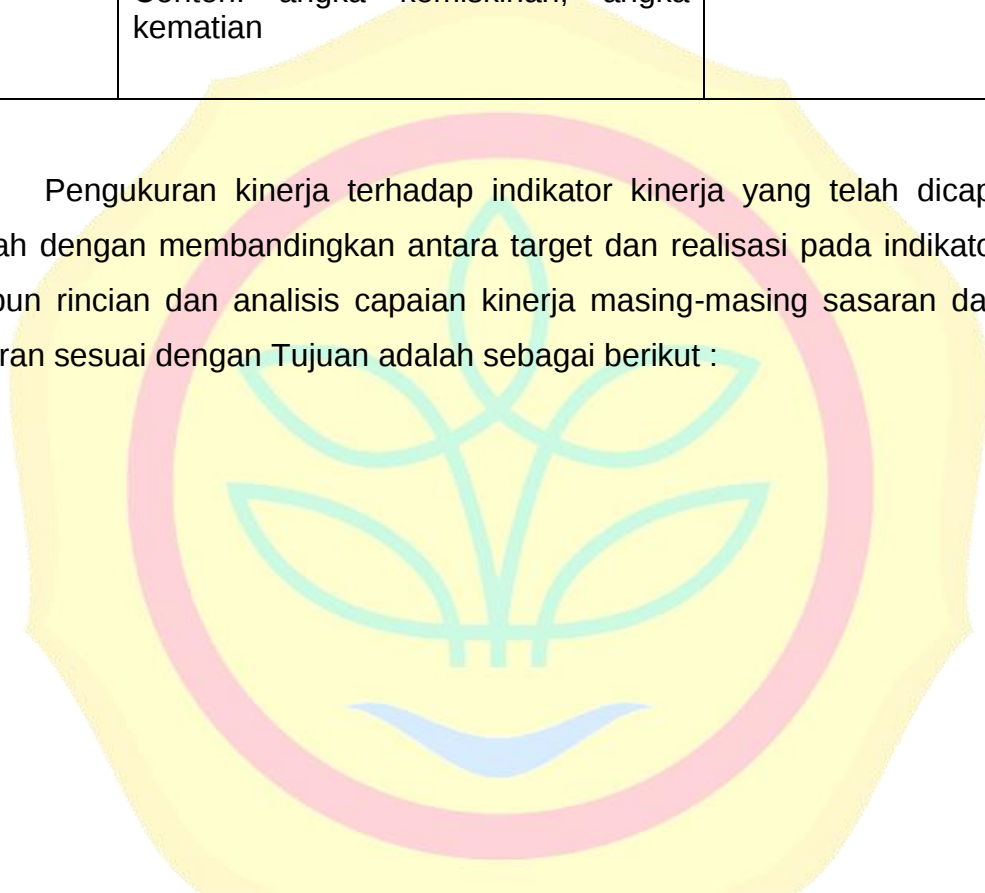
Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah</i>	Realisasi ----- X 100%
	Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.	Target

Asumsi II (kondisi tidak umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,</i>	Target ----- X 100% Realisasi
	<i>Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,</i>	Target ----- X 100% Realisasi
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian	

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :



TUJUAN

Meningkatnya Produktivitas dan daya saing sektor unggulan daerah

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke I yaitu **Meningkatnya Produktivitas dan daya saing sektor unggulan daerah**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 1 indikator yaitu Rasio PDRB sektor pertanian dan perikanan.

Tabel 3.1.1
Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	Meningkatnya Produktivitas dan daya saing sektor unggulan daerah	Rasio PDRB sektor pertanian dan perikanan	Persen	16,47

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 1 sasaran yaitu:

1. Meningkatkan kontribusi Komoditas Sub Sektor Pertanian

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kontribusi Komoditas Sub Sektor Pertanian

Meningkatnya kontribusi Komoditas Sub Sektor Pertanian diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kontribusi Komoditas Sub Sektor Pertanian	Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	4,02	4,11	8,91	5	5,03	100,6
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									100,6

Tabel 3.1.3

Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO.	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya kontribusi Komoditas Sub Sektor Pertanian	Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	5	5,03	100,6	5,7	88,24

Capaian Kinerja Terhadap PDRB Nasional dan Provinsi Kalsel

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Nasional	Provinsi
1	Meningkatnya kontribusi Komoditas Sub Sektor Pertanian	Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	14,35	10,42

Berdasarkan data dari Badan Pusat statistik, pada Triwulan III tahun 2025 PDRB sektor Pertanian (Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan) Nasional sebesar 14,35%, dimana PDRB Pertanian sektor pertanian disumbang dari produksi tertinggi pada tanaman pangan yaitu padi dan jagung, untuk tanaman pangan menyumbang produksi pada padi nasional tahun 2025 sebesar 52,66 juta ton atau mengalami kenaikan sebesar 3,52 juta ton atau kenaikan 6,68 % dibandingkan produksi tahun 2024, sedangkan produksi padi di Kabupaten Tanah Laut mengalami kenaikan sebesar 7.248 ton atau kenaikan sebesar 4,28%, artinya pertumbuhan produksi padi Kabupaten Tanah Laut lebih rendah daripada pertumbuhan produksi padi nasional.

Pada produksi jagung nasional pada jagung pipilan kering di tahun 2025 sebesar 16,11 juta ton, atau mengalami kenaikan sebesar 1,037 juta ton atau sebesar 6,44% dibandingkan produksi tahun 2024, sedangkan produksi jagung di Kabupaten Tanah Laut sendiri pada tahun 2025 sebesar 124.693 ton, atau mengalami kenaikan sebesar 954 ton atau sebesar 0,76 %, pertumbuhan produksi jagung nasional lebih tinggi daripada pertumbuhan produksi jagung tanah laut.

Sedangkan berdasarkan data dari Badan Pusat statistik PDRB sektor Pertanian (Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan) Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 10,42%, dimana PDRB Pertanian sektor pertanian disumbang dari produksi tertinggi pada tanaman perkebunan yaitu sawit dan karet, untuk tanaman perkebunan menyumbang produksi pada sawit di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 sebesar 1,29 juta ton atau mengalami kenaikan sebesar 0,11 juta ton atau kenaikan 8,52% dibandingkan produksi tahun 2024, sedangkan produksi sawit di Kabupaten Tanah Laut mengalami kenaikan sebesar 4.659,8 ton atau kenaikan sebesar 5,69%, artinya pertumbuhan produksi sawit Kabupaten Tanah Laut lebih rendah daripada pertumbuhan produksi sawit nasional.

Komoditas penyumbang terbesar PDRB sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan lainnya adalah komoditas karet, dimana produksi Karet di Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2025 sebesar 197,7 ribu ton, atau mengalami kenaikan sebesar 7,1 ribu ton atau sebesar 3,59% dibandingkan produksi tahun 2024, sedangkan produksi karet di Kabupaten Tanah Laut di tahun 2025 sebesar 22.048,8 ton, atau mengalami kenaikan sebesar 621 ton atau sebesar 2,81 %, pertumbuhan produksi Karet Provinsi lebih tinggi daripada pertumbuhan produksi karet Tanah Laut.

Rasio PDRB Sektor Pertanian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian adalah adalah nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor pertanian dalam suatu wilayah atau daerah dalam satu tahun. PDRB sektor pertanian mencakup nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

PDRB sektor pertanian digunakan sebagai indikator untuk mengukur kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian suatu daerah atau wilayah. PDRB sektor pertanian juga dapat digunakan untuk menganalisis struktur ekonomi suatu daerah dan mengidentifikasi potensi sektor pertanian yang dapat dikembangkan.

Dalam pengukuran PDRB Sektor pertanian, komponen data utamanya adalah data produksi, artinya tahap paling awal dilakukan adalah dengan penghitungan jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam 1 tahun, dalam hal komoditas penghitungan PDRB dilakukan pengukuran produksi tanaman pangan diambil dari komoditas padi dan jagung, produksi hortikultura dari komoditas cabe dan bawang merah dan dari produksi perkebunan dari komoditas kelapa sawit dan karet.

Tahapan selanjutnya dalam menghitung PDRB sektor pertanian adalah dengan menghitung rata-rata harga jual yang berlaku dan menghitung biaya antara atau biaya produksi pada komoditas padi, jagung, cabe, bawang merah, karet dan kelapa sawit.

Setelah didapatkan data jumlah produksi, data harga jual yang berlaku dan data biaya antara, maka dilakukan perhitungan dengan rumus :

$$\text{PDRB Sektor Pertanian} = \frac{\text{Nilai Tambah Bruto (NTB)}}{\text{Biaya Antara}}$$

dimana Nilai Tambah Bruto (NTB) = Jumlah Produksi x Harga jual (harga berlaku).

Grafik 3.1.2

Rasio PDRB Sub Sektor Pertanian Tahun 2023 – 2025



1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan rasio PDRB sektor pertanian Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2023 s/d 2025 Fluktuatif mengalami kenaikan dan penurunan, khusus pertumbuhan rasio PDRB sektor pertanian tahun 2025 memenuhi target kinerja (target 5%, realisasi 5,03%), namun jika dibandingkan dengan rasio PDRB sektor pertanian tahun 2024 maka tahun 2025 mengalami penurunan rasio PDRB sektor pertaniannya.

rasio PDRB sektor pertanian berbanding lurus dengan pertumbuhan produksi komoditas pertanian, hal ini bisa dijelaskan bahwa produksi pertanian sebagai komponen utama dalam menghitung rasio PDRB sektor pertanian, adapun penyebab rasio PDRB tahun

2025 lebih rendah dari tahun 2024 salah satunya adalah 3 komoditas pertanian (kacang tanah, cabe dan bawang merah) yang merupakan bagian dari 9/Sembilan komoditas utama (padi, jagung, durian, karet, sawit dan kopi) mengalami penurunan produksi jika dibandingkan dengan produksi tahun 2024.

Selain 3/tiga komoditas (kacang tanah, cabe dan bawang merah) yang produksi tahun 2025 lebih rendah dari pada produksi tahun 2024, penyebab lainnya adalah perbandingan kenaikan produksi komoditas padi dari tahun 2023 ke 2024 lebih tinggi daripada kenaikan produksi tahun 2024 ke 2025, dimana kenaikan produksi tahun 2023-2024 sebesar 21.859,9 ton atau 14,8% pertumbuhan produksinya, sedangkan pertumbuhan produksi padi tahun 2024-2025 hanya sebesar 7.248 ton atau sebesar 4,3%.

Perbedaan atau penurunan pertumbuhan produksi ini disebabkan karena tahun 2024 adanya berbagai program dan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi pertanian, diantaranya Program Optimalisasi Lahan Rawa (Opla) tahun seluas 16.541 ha dan sedangkan program Opla di tahun 2025 hanya sebesar 2.840,28 ha, dan Program cetak sawah rakyat (CSR) sebesar 3.694,73 ha masih dalam proses pekerjaan fisiknya, sehingga peningkatan produksi padi/beras di tahun 2024 lebih tinggi daripada tahun 2025.

Pada tanaman Jagung, kenaikan produksi pada tahun 2025 dilakukan dengan cara intensifikasi, karena banyaknya alih fungsi lahan tanaman jagung ke sawit, cara intensifikasi yaitu perubahan penggunaan benih oleh para petani jagung, dari yang sebelumnya petani menggunakan benih non unggul/lokal sekarang beralih menggunakan benih hibrida/unggul yang mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi, dengan rata-rata produktivitas 7,8 ton/ha, dan adanya bantuan sarana produksi dari kementerian pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan berupa benih, pupuk dan pestisida.

Sedangkan faktor biaya produksi juga berpengaruh pada besarnya PDRB sektor pertanian, dimana pada tahun 2025 ini biaya produksi khususnya untuk tanaman pangan (padi dan jagung) lebih rendah daripada biaya produksi tahun 2024, hal ini disebabkan adanya bantuan Sarana produksi dari Kementerian Pertanian berupa Alat dan Mesin Pertanian yang berjumlah 975 unit, Pupuk dan Benih, sehingga petani bisa menekan biaya produksi, yang biasanya rata-rata pengeluaran untuk olah tanah pada tahun 2024 sebesar Rp.1.200.000.00,-/ha, tapi pada tahun 2025 rata-rata pengeluaran untuk olah tanah hanya Rp.750.000.000,-/ha.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator Kinerja	2025			2026			2027			2028			2029			Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
PDRB Sektor Pertanian	5%	5%	100,60%	5,1%			5,3%			5,5%			5,7%			5,7%

Pada tahun pertama Renstra capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PDRB Sektor Pertanian tahun 2025 sudah memenuhi target, yaitu PDRB sebesar 5% dengan realisasi sebesar 5,03%, dengan target pada tahun terakhir Renstra/ tahun 2029 sebesar 5,7%.

Jika rasio PDRB Sektor Pertanian tahun 2025 sebesar 5,03% dibandingkan dengan target akhir Renstra PRDN Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebesar 5,7% maka pemenuhan target baru sebesar 88,24%, masih memerlukan peningkatan kinerja untuk mencapai target 5,7% pada akhir tahun Resntra.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Dengan keterbatasan data PDRB Sektor Pertanian pada Kabupaten/Kota lain dan Provinsi, maka dalam pengukuran tolak ukur kinerja atau perbandingan realisasi kinerja pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dengan Kabupaten/Kota lain dan Provinsi, maka pengukuran dapat dilakukan melalui membandingkan produksi yang dihasilkan pada tahun penilaian/tahun (n) dibandingkan dengan produksi pertanian 2 tahun sebelumnya, karena Pertumbuhan PDRB sektor pertanian berbanding lurus dengan pertumbuhan produksi komoditas pertanian, hal ini bisa dijelaskan bahwa produksi pertanian sebagai komponen utama dalam menghitung PDRB sektor pertanian.

Data Produksi Komoditas Pertanian
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023,
2024 dan 2025

No	Komoditas	Produksi (Ton) 2023	Produksi (Ton) 2024	Produksi (Ton) 2025	Kenaikan Produksi (Ton) 2025	Penurunan Produksi (Ton) 2025
1.	Padi	875.546	979.359	1.045.076	65.717	
2.	Jagung	112.150,44	120.704,39	127.673	6.968,61	
3.	Kacang Tanah	1.132	1.235	897		338
4.	Bawang Merah	483,5	479,4	423,7		55,7
5.	Cabe	13.255,1	13.579	13.896	317	
6.	Durian	382	478	522	44	
7.	Karet	153.200	154.034	155.364	1.330	
8.	Sawit	1.131.500	1.272.785	1.389.434	116.649	
9.	Kopi	700	900	1.075	175	

Sumber Data : Pengolahan Data Sementara Distrikhorbun 2025

dapat dilihat dari gambaran tabel diatas komoditas pertanian Provinsi Kal-Sel untuk komoditas kacang tanah dan bawang merah mengalami penurunan produksi dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 hal ini karena :

1. Analisa

1. Pada komoditas kacang tanah, berkurangnya bantuan sarana produksi kacang tanah berupa bibit, pupuk dan pestidisa dari Kementrian Pertanian berdampak langsung pada pengembangan kacang tanah.
2. Pada komoditas tanaman bawang merah, penurunan produksi diakibatkan adanya modal yang cukup besar untuk budidaya tanaman bawang merah, rata-rata sebesar Rp. 80.000.000,-/ha, sehingga petani kesulitan untuk pengembangan bawang merah.
3. Penurunan produksi pada bawang merah di Provinsi Kalimantan Selatan dikarenakan adanya alih fungsi lahan tanaman bawang merah ke tanaman perkebunan (kelapa sawit) yang mengakibatkan penurunan produksi bawang

merah.

4. Dampak perubahan iklim juga berpengaruh pada komoditas bawang merah di Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami serangan penyakit muller, yang mengakibatkan kenaikan produksi tidak begitu besar.

2. Kendala

1. Terbatasnya alokasi bantuan dari Kementrian Pertanian terhadap pengembangan kacang tanah.
2. Adanya serangan hama penyakit tanaman secara besar-besaran di Kalimantan Selatan pada komoditas bawang merah, sehingga terjadi banyak gagal panen.
3. Terjadinya alih pemanfaatan fungsi lahan di Kalimantan Selatan terutama dari petani sawah menjadi petani pekebun karet dan kelapa sawit dengan memanfaatkan lahan untuk dijadikan komoditas tanaman yang cepat menghasilkan nilai ekonomis/nilai tambah bagi para petani.
4. Curah hujan yang tinggi di tahun 2025 menyebabkan tanah menjadi lembab, sehingga bawang merah mudah terserang penyakit.

3. Solusi

1. Melaksanakan pembibitan kacang tanah secara swadaya/mandiri kepada petani.
2. Melakukan pengenalan organisme penyakit tanaman daerah yang sangat rawan diserang hama penyakit tanaman dengan pengendalian serentak/bersamaan.
3. Melakukan pengendalian oleh para penyuluh pertanian di Kabupaten dan Kota kepada para petani tentang keberadaan manfaat Lahan Pangan Berkelanjutan kepada para petani padi (Sawah).
4. Melakukan/melaksanakan pelatihan berupa Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL PHT) kepada petani bawang.

5. Rencana Aksi

1. Menciptakan salah satu kampung penangkar kacang tanah di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Melalui pemerintah provinsi Kalimantan Selatan untuk segera memohonkan usulan bantuan terutama untuk benih bawang merah kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada lahan berdampak serangan hama penyakit, karena modal yang paling besar dalam budidaya bawang merah adalah untuk pembelian benih bawang merah.
3. Memberikan bantuan modal/stimulus berupa bantuan sarana produksi pertanian yang lebih diprioritaskan kepada pemilik lahan untuk petani (sawah) bawang merah.
4. Melakukan pengaturan jadwal tanam bawang merah yang disesuaikan dengan musim, sehingga bisa meminimalkan potensi serangan hama dan penyakit tanaman.

Dari tabel data produksi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023, 2024 dan 2025 diatas komoditas yang mengalami penurunan produksi berupa komoditas kacang tanah dan bawang merah yang secara langsung tentu akan berdampak pada penurunan produksi untuk Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan.

Sedangkan untuk komoditas lainnya padi, jagung, cabe, durian karet, sawit dan kopi di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 dan 2025 telah mengalami peningkatan produksi, tentu akan berdampak pada peningkatan produksi untuk Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data produksi pembandingan dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Tanah Laut, untuk tingkat kenaikan produksi komoditas di Tanah Laut terjadi pada 6/enam komoditas padi, jagung, durian, karet, sawit dan kopi, sedangkan yang mengalami penurunan produksi di Kabupaten tanah Laut ada 3 komoditas, yaitu kacang tanah, cabe, dan bawang merah.

Khusus untuk komoditas kacang tanah dan bawang merah hal ini berbanding lurus dengan penurunan produksi di Provinsi jika dibandingkan dengan tahun 2024, yang menjadi penyebab penurunan sebagian dipengaruhi oleh hal yang sama, yaitu menurunannya bantuan sarana produksi dari pemerintah untuk pengembangan kacang tanah dan bawang merah, faktor yang membedakan adalah penurunan produksi bawang merah di Tanah Laut disebabkan oleh kombinasi faktor produksi yang tidak optimal (benih, lahan, tenaga kerja), serangan hama dan penyakit (seperti busuk umbi), degradasi kesuburan tanah akibat penggunaan kimia, cuaca ekstrem (banjir, hujan deras), serta masalah pasca-panen seperti susut bobot saat penyimpanan. Efisiensi penggunaan input seperti benih dan lahan seringkali belum maksimal, dan penyimpanan benih yang tidak tepat sehingga kualitas benih menjadi rendah yang menyebabkan produksi rendah dan gampang terserang OPT, sementara hama dan penyakit seperti kutu daun, ulat daun, dan layu fusarium sangat berpengaruh.

Sedangkan penurunan produksi cabe di Kabupaten Tanah Laut jika dibanding dengan produksi di Provinsi yang mengalami kenaikan produksi jika dibanding dengan tahun 2024, hal ini disebabkan kombinasi faktor eksternal seperti cuaca ekstrem (hujan berlebih), masalah hama dan penyakit (terutama virus kuning, antrak, kutu kebul dan jamur), serta penggunaan pupuk, pestisida) yang tidak efisien, kurangnya pengetahuan, yang semuanya berdampak pada penurunan hasil panen dan fluktuasi harga, meskipun terkadang produksi berlimpah justru menurunkan harga, disamping itu pola tanam petani bergeser pada tanaman hortikultura lain (gambas dan pare).

Sedangkan perbandingan kinerja Distanhorbun tahun 2025 dengan Nasional, dapat diukur dengan PDRB sektor pertanian pada Triwulan III, dimana berdasarkan data dari Badan Pusat statistik, pada Triwulan III tahun 2025 PDRB sektor Pertanian (Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan) sebesar 14,35%, dimana PDRB Pertanian sektor pertanian disumbang dari produksi tanaman pangan, produksi hortikultura dan produksi perkebunan, untuk tanaman pangan menyumbang produksi pada padi nasional tahun 2025 sebesar 52,66 juta ton atau mengalami kenaikan sebesar 3,52 juta ton atau kenaikan 6,68 % dibandingkan produksi tahun 2024, sedangkan produksi padi di Kabupaten Tanah Laut mengalami kenaikan sebesar 7.248 ton atau kenaikan sebesar 4,28%, artinya pertumbuhan produksi padi Kabupaten Tanah Laut lebih rendah daripada pertumbuhan produksi padi nasional.

Pada produksi jagung nasional pada jagung pipilan kering di tahun 2025 sebesar 16,11 juta ton, atau mengalami kenaikan sebesar 1,037 juta ton atau sebesar 6,44% dibandingkan produksi tahun 2024, sedangkan produksi jagung di Kabupaten Tanah Laut sendiri pada tahun 2025 sebesar 124.693 ton, atau mengalami kenaikan sebesar 954 ton atau sebesar 0,76 %.

Pada komoditas hortikultura berupa cabe, dimana untuk produksi cabe secara nasional sebanyak 236.400 ton, atau mengalami kenaikan sebesar 1,04%, berbeda dengan kenaikan cabe nasional, dimana produksi cabe di Tanah Laut sebesar 2.541 ton, atau mengalami penurunan sebesar 316 ton atau sebesar 11,06 % daripada produksi tahun 2024.

Bawang merah secara nasional sebesar 1,397 juta ton atau mengalami kenaikan produksi sebesar 0,54 % dibandingkan dengan produksi pada tahun 2024 sebesar 1,38 juta ton, sedangkan produksi bawang merah di Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan sebesar 62,3 ton atau sebesar 51,9% jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2024.

Berdasarkan pengolahan data skunder sementara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan untuk komoditas unggulan selanjutnya pada bidang perkebunan adalah karet, dimana produksi karet secara nasional tahun 2025 sebanyak 2,15 juta ton turun sebesar 1,81% dibandingkan tahun 2024 sebanyak 2,11 juta ton, sedangkan produksi karet di Kabupaten Tanah Laut mengalami kenaikan sebesar 621 ton atau naik sebesar 2,9 % dibanding produksi tahun 2024.

Pada komoditas kelapa sawit produksi secara nasional tahun 2025 sebanyak 57 juta ton dimana jumlah tersebut naik sebesar 13% dibandingkan produksi tahun 2024 sebesar 49,59 juta ton, sedangkan produksi kelapa sawit di Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 sebesar 80.280 ton atau mengalami peningkatan sebesar 4.569,8 ton atau sebesar 6,07% dibanding produksi tahun 2024.

Dari tabel diatas pada tahun 2025 realisasi produksi 6/enam komoditas (padi, jagung, bawang merah, cabe, karet dan sawit) yang sangat berpengaruh pada PDRB sektor pertanian mengalami fluktuatif kenaikan realisasi produksi dibandingkan tahun 2024, hal ini disebabkan karena adanya Optimalisasi Lahan Rawa (opla), Gerakan Nasional Percepatan Tanam, menurunnya serangan hama penyakit tanaman (Tungro), adanya

bantuan sarana produksi/saprodi dari pusat/kementerian dan adl APBD Provinsi baik berupa benih/bibit, pupuk dan obat-obatan.

3) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan “Meningkatnya kontribusi Komoditas Sub Sektor Pertanian”, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan melaksanakan Peningkatan produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), Peningkatan nilai tambah pertanian, Peningkatan kualitas kelembagaan kelompok tani.

a. Peningkatan produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)

Data Produksi Komoditas Pertanian Kab. Tanah Laut
Tahun
2022, 2023 dan 2024

No	Komoditas	Realisasi Produksi (Ton)			Kenaikan Produksi (Ton)		Penurunan Produksi (Ton)	
		2023	2024	2025	2023-2024	2024-2025	2023-2024	2024-2025
1	Padi	147.410,0	169.270,0	176.518,0	21.859,9	7.248,0	-	-
2	Jagung	123.060,0	123.739,0	124.693,0	679,0	954,0	-	-
3	Kacang Tanah	48,0	125,0	50,0	77,0	-	-	75,0
4	Cabe	2.786,3	2.857,0	2.541,0	70,7	-	-	316,0
5	Bawang Merah	111,5	120,0	57,7	8,5	-	-	62,3
6	Durian	54,0	67,0	81,30	13,0	14,3	-	-
7	Karet	19.699,9	21.354,0	22.048,8	1.654,1	621,0	-	-
8	Kelapa Sawit	73.229,7	75.235,0	80.280,0	2.005,3	4.569,8	-	-
9	Kopi	157,0	72,06	174,0	-	101,9	-	84,94
	Jumlah	366.556,4	392.839,1	406.443,8	26.367,5	13.509,0	(84,9)	(453,3)

Sumber Data : Distanhorbun Tanah Laut 2025

1. Peningkatan produksi pada komoditas padi pada tahun 2025 disebabkan adanya Program Optimalisasi Lahan Rawa (Opla) seluas 2.840,28 ha , dan adanya Program Tala Bungas (Tanah Laut Lumbung Beras), yaitu berupa kegiatan dalam upaya peningkatan produksi padi/beras dengan cara Ekstensifikasi (peningkatan indeks pertanaman) dan Intensifikasi (penggunaan benih unggul dan benih lokal umur pendek), program ini diperkuat dengan Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Produksi

Padi, sebab yang ketiga adanya Program Gernas (Gerakan Nasional) percepatan tanam, yaitu gerakan untuk mengatur jadwal tanam yang menyesuaikan dengan keadaan iklim/cuaca, sehingga tanaman padi bisa terpenuhi kebutuhan air nya dan tidak mengalami kekeringan ataupun bisa bertahan apabila terjadi banjir, dan adanya bantuan sarana produksi dari Kementrian Pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi.

2. Pada tanaman Jagung, kenaikan produksi pada tahun 2025 dilakukan dengan cara intensifikasi, karena banyaknya alih fungsi lahan tanaman jagung ke sawit, cara intensifikasi yaitu perubahan penggunaan benih oleh para petani jagung, dari yang sebelumnya petani menggunakan benih non unggul/lokal sekarang beralih menggunakan benih hibrida/unggul yang mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi, dengan rata-rata produktivitas 7,7 ton/ha, dan adanya bantuan sarana produksi dari kementrian pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan berupa benih, pupuk dan pestisida.
3. Tidak tercapainya target produksi kacang tanah di tahun 2025, dari target 100 ton dengan realisasi hanya 50 ton, hanya hanya 50% dari target disebabkan karena menurunnya bantuan dari Pemerintah Pusat/Kementrian Pertanian karena adanya efisiensi untuk pengembangan kacang tanah.
4. Penurunan produksi cabe di tahun 2025 sebesar 316 ton dibandingkan tahun 2024, hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor eksternal seperti cuaca ekstrem (hujan berlebih), masalah hama dan penyakit (terutama virus kuning, antrak, kutu kebul dan jamur), serta penggunaan pupuk, pestisida) yang tidak efisien, kurangnya pengetahuan, yang semuanya berdampak pada penurunan hasil panen dan fluktuasi harga, meskipun terkadang produksi berlimpah justru menurunkan harga, disamping itu pola tanam petani bergeser pada tanaman hortikultura lain (gambas dan pare).
5. Tanaman bawang merah juga mengalami penurunan produksi dibanding tahun 2024, yang disebabkan kombinasi faktor produksi yang tidak optimal (benih, lahan, tenaga kerja), serangan hama dan penyakit (seperti busuk umbi), degradasi kesuburan tanah akibat

penggunaan kimia, cuaca ekstrem (banjir, hujan deras), serta masalah pasca-panen seperti susut bobot saat penyimpanan. Efisiensi penggunaan input seperti benih dan lahan seringkali belum maksimal, dan penyimpanan benih yang tidak tepat sehingga kualitas benih menjadi rendah yang menyebabkan produksi rendah dan gampang terserang OPT, sementara hama dan penyakit seperti kutu daun, ulat daun, dan layu fusarium sangat berpengaruh.

6. Kenaikan produksi durian sebesar 14,3 ton dibanding tahun 2024 disebabkan adanya bantuan sarana berupa pupuk dan pestisida produksi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan untuk peningkatan produktivitas durian.
7. Kenaikan produksi pada tanaman karet sebesar 621 ton dibanding tahun 2024 terjadi karena peningkatan luas tanam karet sebanyak 253 ha pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dan adanya Program Tala Barasih (Tanah Laut Bokar Bersih) yaitu kegiatan pemberdayaan petani berupa pembentukan kelompok Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) pada petani Karet, yang tujuannya untuk meningkatkan produksi karet dan kesejahteraan para petani karet, dengan terbentuknya kelompok UPPB maka hasil karet mempunyai kualitas yang baik (tanpa ada campuran) sehingga nilai jualnya mengalami kenaikan, kenaikan produksi karet juga dikarenakan adanya bantuan sarana produksi baik dari Kementerian Pertanian, Provinsi maupun Kabupaten, berupa pupuk organik cair, benih maupun pestisida.
8. Produksi tanaman sawit yang meningkat pada tahun 2025 sebesar 4.569,8 ton, yang disebabkan adanya penambahan luas area produksi pada Tanaman Menghasilkan (TM) sawit sebanyak 325 ha pada tahun 2023 yang produksinya berpengaruh pada tahun 2025, adanya bantuan pupuk dari anggaran APBD II, dan harga jual sawit pada tahun 2025 cukup bagus sehingga menarik petani untuk menanam sawit.
9. Pada tanaman kopi terjadi kenaikan produksi sebesar 101,9 ton, hal ini disebabkan adanya bantuan sarana produksi berupa pupuk dan pestisida dari APBD Provinsi untuk peningkatan produksi kopi.

1. Peningkatan luas lahan yang ditanami.

Peningkatan luas lahan yang ditanami merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sektor pertanian yang didukung melalui perencanaan program dan kegiatan secara terarah serta pelaksanaan yang berkesinambungan. Upaya peningkatan luas tanam dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta dukungan kebijakan yang mendorong partisipasi aktif petani dalam memperluas areal tanam.

Selain itu, peningkatan luas lahan yang ditanami juga didukung oleh sinergi lintas sektor, antara lain melalui ketersediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian, pendampingan teknis kepada petani, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Melalui berbagai upaya tersebut, realisasi peningkatan luas lahan tanam dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan produksi.

Data Luas Panen			
Komoditas	Luas Tanam (ha)		Kenaikan (ha)
	2024	2025	
Padi	45.562	50.316	4.754
Jagung	16.398	16.417	19
Kacang Tanah	105	39	- 66
Cabe	19.950	15.000	- 4.950
Bawang Merah	8	4	- 4
Durian	105	106	1
Sawit	12.691,60	13.522	830
Karet	14.852	14.822	- 30
Kopi	145	152	7
Sumber Data : Distanhorbun 2025			

Dari data perkembangan luas lahan yang ditanami tahun 2024 dan 2025 ke sembilan komoditas di Kabupaten Tanah Laut, terdapat 4/empat komoditas yang mengalami penurunan luas tanam, yaitu komoditas kacang tanah, cabe, bawang merah dan karet, sedangkan 6/enam komoditas padi, jagung, durian, sawit dan kopi mengalami kenaikan luas tanam.

Penurunan luas tanam kacang tanah, cabe, bawang merah dan karet penyebab utamanya adalah berkurangnya bantuan sarana produksi berupa benih/bibit dan pupuk dari pemerintah, baik dari Provinsi maupun Pusat, hal ini membuat petani mengalami kendala terutama permodalan dalam pengembangan ketiga komoditas tersebut, terutama pada kacang tanah, dimana petani lebih memilih tanam padi atau sayuran. Ketika harus melakukan penanaman secara swadaya/mandiri, hal ini dinilai petani lebih menguntungkan menanam sayuran berupa sawi, terong dan papaya yang nilai jualnya lebih stabil di tahun 2025 dibandingkan dengan nilai jual kacang tanah.

Sedangkan untuk cabe dan bawang merah walaupun luas tanam mengalami penurunan, pendampingan secara intensif terus dilakukan kepada petani untuk meningkatkan Produktivitas tanamannya, hal ini terbukti dari capaian target produksi cabe dan bawang merah di tahun 2025 bisa memenuhi target produksi.

a) Penyaluran sarana pertanian

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran sarana pertanian berupa pupuk bersubsidi dilaksanakan secara terarah dan terkoordinasi dengan baik melalui keterlibatan lintas sektor terkait. Kegiatan pengawasan ini dilakukan dengan memperkuat koordinasi antara perangkat daerah teknis, instansi terkait, serta **Aparat Penegak Hukum (APH)** bersama dengan Kejaksaan dan Kepolisian guna memastikan penyaluran pupuk bersubsidi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sinergi lintas sektoral tersebut berperan penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, maupun distribusi pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran.

Melalui mekanisme pengawasan yang berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, distribusi, hingga pemanfaatan di tingkat petani, penyaluran pupuk bersubsidi dapat dikendalikan secara optimal. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektoral dan dukungan APH menjadi faktor strategis dalam mewujudkan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran, serta mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.

Adapun tujuan dari pengawasam penyaluran pupuk subsidi, yaitu untuk memastikan bahwa penyaluran pupuk subsidi sesuai dengan 7 T (7 Tepat), yaitu :

1. Tepat Jumlah, artinya Jumlah pupuk yang diterima petani sama dengan jumlah pupuk yang diperlukan petani.
2. Tepat Jenis, artinya Jenis pupuk yang diterima petani sama dengan jenis pupuk yang diperlukan petani
3. Tepat Waktu, artinya Pupuk yang diterima petani sesuai dengan waktu keperluan memupuk
4. Tepat Mutu, artinya Mutu pupuk yang diterima petani sesuai dengan standar/kemasan
5. Tepat Tempat, artinya Pupuk diterima petani sesuai dengan tempat pemesanan pupuknya
6. Tepat Harga, artinya Pupuk yang dibeli petani harganya sesuai dengan Harga Ecerean Tertinggi (HET)
7. Tepat Penerima, artinya Penerima pupuk subsidi adalah petani yang terdaftar di ERDKK.

Dokumentasi Pengawasan Penyaluran Pupuk Subsidi



b) Penyediaan bibit/benih yang akan ditanam

Penyediaan sarana pertanian berupa bibit/benih merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi tanaman, melalui penggunaan benih unggul/hibrida, karena bibit/benih unggul/hibrida mempunyai keunggulan produksi dibandingkan dengan bibit/benih lokal, karena bibit/benih unggul mempunyai produktivitas rata-rata sebesar 4 - 4,5 ton/ha, sedangkan benih lokal produktivitasnya hanya sebesar 2,5 - 3 ton/ha.

Dari segi waktu budidaya, umur bibit/benih unggul/hibrida lebih pendek daripada benih lokal, dimana bibit/benih unggul mempunyai waktu budidaya sekitar 3 bulan, sedangkan benih lokal waktu budidayanya sekitar 4 – 6 bulan.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, pada tahun 2025 menyediakan bibit/benih tanaman yang fokus pada komoditas padi, karena komoditas padi merupakan tanaman pokok makanan masyarakat Indonesia, dan disamping untuk mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia yang kegiatan fisiknya melalui Cetak Sawah Rakyat (CSR), dengan lokus pengembangan bibit/benih unggul/hibrida di Kecamatan sentra padi (Kurau, Bumi Makmur, Pelaihari, Takisung, Bati-Bati, Tamabang Ulang dan Panyipatan).

Dokumentasi Penyediaan Bibit/Benih Tanaman





c) Penyediaan alat mesin pertanian

Alat mesin pertanian (Alsintan) merupakan salah sarana penting yang diperlukan oleh petani, karena alsintan digunakan oleh petani dalam mengolah lahan, perawatan tanaman, pengendalian hama dan panen.

Sehingga petani sangat memerlukan alsintan dalam budidaya tanaman, baik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, karena penggunaan alsintan untuk mengurangi biaya produksi mulai dari olah tanah hingga panen.

Tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mendapatkan bantuan Alsintan dari Kementerian Pertanian yang jumlahnya sampai 975 unit, mulai dari alsintan pra panen (handtraktor, Traktor, Alat tanam padi, pompa air dan Rotavator) dan alat panen (combine, alat panen jagung dan alat perontok padi), yang semua alsintan tersebut dihibahkan kepada Petani/Brigade Pangan.

Tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan membentuk UPT Balai Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), yang mempunyai Alsintan sebanyak mempunyai 170 unit Handtraktor, 31 unit Traktor, 32 unit Alat Tanam Padi, 135 unit Pompa Air, 26 unit Cultivator, dan 1 unit Excavator PC 45, yang semua alat tersebut dikelola dengan sistem pinjam pakai secara gratis kepada petani/kelompok tani.

Dokumentasi Penyediaan Alsintan



d) Pembangunan jalan pertanian

Perencanaan kebutuhan yang disusun secara matang serta pelaksanaan kegiatan yang berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai, menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan pembangunan fisik **Jalan Usaha Tani (JUT)**. Melalui proses perencanaan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat serta tahapan pelaksanaan yang dilakukan secara tertib administrasi dan teknis, pembangunan Jalan Usaha Tani dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pembangunan JUT tersebut diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas sarana transportasi hasil pertanian, memperlancar mobilitas petani, serta mendukung peningkatan produktivitas dan perekonomian masyarakat perdesaan.

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan **Pembangunan Jalan Produksi (JP)** juga menunjukkan hasil yang optimal. Dengan dukungan anggaran yang memadai serta pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada ketentuan teknis dan regulasi yang berlaku, pembangunan Jalan Produksi sebanyak dapat direalisasikan sesuai dengan target kinerja

yang telah direncanakan. Pembangunan Jalan Produksi ini berperan penting dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah produksi, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta memperkuat akses masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini mencerminkan sinergi yang baik antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pendukung sektor pertanian dan ekonomi masyarakat.

Tahun 2025 pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sebanyak 26 unit dan pembangunan Jalan Produksi (JP) sebanyak 62 unit, berikut contoh pembangunan jalan usaha tani yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.

No	Desa	Kecamatan	Foto
1.	Desa Batu Ampar RT.7	Batu Ampar	
2.	Desa Ranggung	Takisung	
3.	Desa Galam	Bajuin	
4.	Desa Jilatan Alur	Batu Ampar	
5.	Desa Ujung	Bati-Bati	

Berikut contoh pembangunan jalan produksi yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.

No	Desa	Kecamatan	Foto
1.	Desa Gunung Melati RT.11/02	Batu Ampar	
2.	Desa Mekar Sari	Kintap	
3.	Desa Ambungan	Pelaihari	
4.	Desa Tajau Mulya	Batu Ampar	
5.	Desa Benua Lawas RT.5	Takisung	
7.	Desa Bajui	Bajui	

8.	Desa Damit	Batu Ampar	
9.	Desa Martadah	Tambang Ulang	

e) Penyediaan data kelompok tani penerima sarana pertanian & data lahan irigasi

Kelembagaan kelompok tani yang anggota terdiri dari para petani merupakan objek sasaran kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, pada tahun 2025 jumlah kelompok tani yang ada di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 1.750 kelompok tani, yang tersebar di 11 Kecamatan, dengan jumlah petani penerima sarana produksi berupa pupuk subsidi sebanyak 25.680 petani, dengan rinciannya ;

No.	Wilayah	Jumlah Petani Penerima Pupuk Subsidi (Orang)	Jumlah Rencana Tanam (ha)	Jumlah Urea (Kg)	Jumlah NPK (Kg)
1	TAKISUNG	4.246,00	7.321,67	1.177.967,00	2.062.975,00
2	JORONG	858,00	1.702,95	225.859,00	585.982,00
3	PELAIHARI	3.050,00	7.007,30	1.052.325,00	2.231.665,00
4	KURAU	3.243,00	6.254,11	764.973,00	1.751.946,00
5	BATI BATI	3.211,00	5.101,50	519.630,00	1.351.955,00
6	PANYIPATAN	3.358,00	8.074,20	1.837.966,00	2.664.094,00
7	KINTAP	576,00	1.078,30	147.663,00	414.413,00
8	TAMBANG ULANG	2.183,00	4.423,25	857.677,00	1.211.944,00
9	BATU AMPAR	1.039,00	2.516,50	457.236,00	1.011.348,00
10	BAJUIN	1.382,00	3.379,35	608.270,00	1.023.200,00
11	BUMI MAKMUR	2.714,00	7.855,50	920.562,00	1.131.090,00
Total		25.860	54.714,63	8.570.128,00	15.440.612,00

Sedangkan data lahan pertanian atau Lahan Baku Sawah (LBS) di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 sama dengan tahun 2024, yaitu sebanyak 27.115,43 ha, dengan Indeks Pertanaman (IP) paling banyak adalah IP 200, artinya masih

banyak petani di Kabupaten Tanah Laut masih tanam 2x dalam setahun dengan luasnya 13.679,81 ha atau ada peningkatan tanam 2x dalam setahun sebanyak 1.144,86 ha dibandingkan tahun 2024, dengan rinciannya sebagai berikut :

No	KECAMATAN	LBS 2024	Tahun 2024		Tahun 2025		Peningkatan	
			IP 200	IP 300	IP 200	IP 300	IP 200	IP 300
1	BUMI MAKMUR	4.870,33	1.682,80	25,00	1.834,46	25,00	151,66	-
2	KURAU	3.700,27	2.303,31	-	2.153,31	250,00	150,00	250,00
3	BATI-BATI	3.112,91	874,00	-	1.074,00	-	200,00	-
4	TAMBANG ULANG	3.169,29	3.212,58	10,00	3.053,04	10,00	159,54	-
5	PELAIHARI	4.134,18	1.810,02	100,00	2.160,02	100,00	350,00	-
6	TAKISUNG	3.281,13	1.205,54	110,00	1.505,70	110,00	300,16	-
7	BATU AMPAR	707,01	392,45	15,00	391,13	15,00	1,32	-
8	BAJUIN	619,04	110,50	5,00	259,50	5,00	149,00	-
9	PANYIPATAN	2.741,70	689,25	65,00	839,65	65,00	150,40	-
10	JORONG	529,33	140,50	100,00	254,00	100,00	113,50	-
11	KINTAP	250,24	114,00	55,00	155,00	55,00	41,00	-
TOTAL		27.115,43	12.534,95	485,00	13.679,81	735,00	1.144,86	250,00

Dokumentasi Petani Penerima Pupuk Subsidi dan Lahan Pertanian



f) Pelatihan penggunaan teknologi pertanian terbaru

Pemberdayaan petani salah satu melalui peningkatan wawasan dan pengetahuan dalam meningkatkan kemampuan budidaya dengan memanfaatkan bahan

sekitar/bahan alami dengan mengedepankan pertanian hijau, yang artinya pertanian yang ramah lingkungan dengan pengurangan penggunaan bahan kimia.

Pada tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan melaksanakan pelatihan penggunaan teknologi terbaru melalui Sekolah Lapang (SL) untuk penanganan hama dan penyakit tanaman atau melakukan pembuatan pupuk secara organik untuk peningkatan unsur hara tanaman dengan pengurangan penggunaan bahan kimia, yang dilaksanakan pada di Kecamatan Kurau dan Bati-Bati untuk komoditas padi.

Dokumentasi Penggunaan Teknologi Terbaru



2. Penyediaan lahan cetak pertanian baru

a) Validasi data lahan cetak sawah

Cetak sawah pada tahun 2025 merupakan program dari Kementerian Pertanian, yang dilaksanakan di daerah, yang salah satunya di Kabupaten Tanah Laut, pada tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut mendapatkan alokasi cetak sawah kurang lebih seluas 30.000 ha, yang tersebar di 11 Kecamatan.

Pada awal 2025 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan melakukan validasi alokasi cetak sawah dari kementerian kurang lebih seluas 30.000 ha, setelah dilakukan validasi lahan yang akan dilaksanakan cetak sawah harus clean dan clear, artinya lahan tidak ada masalah administrasi (masuk Kawasan hutan) maupun sosial (lahan adat).

Setelah dilakukan validasi maka didapatkan luas lahan yang bisa dilaksanakan program cetak di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 4.975,72 ha, dengan luas cetak sawah sebagai berikut :

KABUPATEN	Desa dan Kecamatan		Luas Kontrak cetak sawah (ha)
Tanah Laut	1	Kurau & Panyipatan, Tanah Laut	216,15
	2	Pagatan Besar, Takisung, Tanah Laut	546,80
	3	Takisung, Tanah Laut	464,80
	4	Sungai Pinang, Tambang Ulang, Tala	141,92
	5	Kintap dan Sabuhur, Tanah Laut	112,50
	6	Padang Luas, Kurau, Tanah Laut	103,50
	7	Ujung, Bati-Bati, Tanah Laut	359,90
	8	Padang & Panggung Baru, Tanah Laut	604,08
	9	Panyipatan, Panyipatan, Tanah Laut	651,00
	10	Liang Anggang & Pandahan, Tanah Laut	1.148,40
	11	Sungai Pinang, Tambang Ulang, Tanah Laut	119,00
	12	Swarangan & Asam-Asam, Jorong, Tanah Laut	100,18
	13	Birayang Atas, Bumi Makmur, Tanah Laut	407,49
Total Cetak Sawah Kabupaten Tanah Laut			4.975,72

3. Peningkatan pengendalian serangan hama

a) Sosialisasi penanganan hama dan penyakit tanaman

Salah upaya dalam meningkatkan produksi pertanian adalah dengan pengendalian hama dan penyakit tanaman, salah satu upaya nyata yang dilakukan

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan pada tahun 2025 adalah melakukan Gerakan Pengendalian (Gerdal) berupa kegiatan Gropoyakan Tikus di Kecamatan Kurau, Bati-Bati, Takisung, Panyipatan dan Pelaihari, dengan target kegiatan gropoyang tikus tersebut dapat mengurangi serangan hama tikus sebanyak 25% pada tanaman padi.

Dengan sistem gotong royong kegiatan gropoyakan tikus dilakukan pada tiap petak sawah yang mempunyai potensi besar serangan hama tikus, dan sebelum dilakukan kegiatan gropoyakan, para petani diberikan sosialisasi dan pelatihan/pembelajaran tentang alat/sarana yang digunakan dan alur/peta gropoyan, agar kegiatan gropoyakan tersebut dapat berjalan secara efektif.



b) Penyediaan sarana pembasmi hama dan penyakit tanaman

Dalam pelayanan kepada petani, salah satu upaya yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah penyediaan sarana pembasmi hama dan penyakit tanaman, berupa Pestisida.

Penyediaan sarana ini diberikan atau dilaksanakan Ketika terjadi serangan hama dan penyakit yang tidak bisa ditangani secara mandiri oleh petani/kelompok tani, dengan luasan minimal 4 ha serangan hama/penyakit tanaman, tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan salah satunya menyediakan 50 kg Fungisida, 240 botol Insektisida, 150 botol Moluscusida dan 720 Rodentisida.

Dokumentasi Penyediaan sarana pembasmi hama



4. Peningkatan penanganan bencana pertanian

a) Penyediaan sarana pembasmi hama dan penyakit tanaman

Penyediaan sarana pembasmi hama dan penyakit tanaman pada penanganan bencana pertanian lebih di fokuskan pada penannagan dampak perubahan iklim, atau pencegahan.

Pencegahan yang dimaksudkan adalah penguatan tanaman dalam pemenuhan unsur haranya untuk menghadapi perubahan iklim, dalam ini pemberian vitamin tanaman atau pupuk diperlukan untuk tanaman agar tanaman tidak mudah terserang hama dan penyakit.

Salah satu tanaman yang mudah terdampak pada terjadi perubahan iklim adalah tanaman tahunan atau tanaman perkebunan, pada tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan meyediaan sarana (pupuk cair) untuk tanaman perkebunan sebanyak 2.930 botol.

Dokumentasi Penyediaan Sarana Pembasmi Hama dan Penyakit



b) Koordinasi penanganan bencana pertanian hama dan penyakit tanaman

Dalam penanganan hama dan penyakit tanaman di Kabupaten Tanah Laut, diperlukan adanya kerja sama/koordinasi lintas sektor, terutama dengan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan

Hal ini perlu dilakukan karena Kabupaten Tanah Laut di tahun 2025 hingga saat ini tidak mempunyai tenaga/pegawai spesialis pengamat hama dan penyakit tanaman (POPT), Dinas Pertanian Provinsi yang selama ini mempunyai pegawai POPT tersebut, sehingga rapat koordinasi perlu dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan serangan hama dan penyakit tanaman.

Dokumentasi Koordinasi Penanganan Bencana Pertanian



b. Peningkatan nilai tambah pertanian

1. Peningkatan kerjasama kemitraan

Dalam upaya peningkatan nilai tambah pertanian yang merupakan proses meningkatkan nilai produk pertanian melalui pengolahan, pengemasan,

dan pemasaran yang lebih efektif, sehingga produk tersebut memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan di tahun 2025 melaksanakan kegiatan untuk peningkatan nilai tambah pertanian dengan meningkatkan kerjasama kemitraan antara petani/kelompok tani dengan perusahaan.

Salah satu kegiatan yang diterapkan adalah memfasilitasi kemitraan antara perusahaan PT.Brigestone (perusahaan karet) dengan petani kebun karet yang ada di Kabupaten Tanah Laut, dimana PT. Brigestone dan kelompok tani akan bekerjasama dalam Replanting/peremajaan karet dan penjualan karet.

Tahun 2025 lokus fasilitasi kemitraan antara petani dengan PT.Brigestone adalah di Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Batu Ampar, dengan target peserta fasilitasi minimal 30 petani karet. Peningkatan promosi produk pertanian

Dokumentasi Fasilitasi Kemitraan



2. Sertifikasi varietas unggul

Fasilitasi HAKI, perlindungan varietas tanaman komoditas pertanian

Kegiatan failitasi HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah upaya untuk memfasilitasi dan mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual, seperti paten, merek, desain industri, dan hak cipta, dalam konteks pertanian.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di Tahun 2025 melaksanakan kegiatan failitasi HAKI kepada petani/kelompok tani tentang produk komoditas pertaniannya, yang meliputi:

- a) Pendampingan dan konsultasi untuk petani dan pelaku usaha pertanian dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual
- b) Pelatihan dan edukasi tentang pentingnya perlindungan HAKI
- c) Bantuan dalam proses pendaftaran dan pengurusan HAKI
- d) Advokasi untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan HAKI di sektor pertanian

Tujuan failitasi HAKI adalah untuk meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual di sektor pertanian, sehingga dapat meningkatkan inovasi, kreativitas, dan daya saing produk pertanian.

Dokumentasi Fasilitasi HAKI





3. Peningkatan kapasitas penangkar varietas

Peningkatan kapasitas penangkar benih adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas penangkar benih dalam memproduksi benih yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Peningkatan kapasitas penangkar benih di Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebuan di Tahun 2025 meliputi :

- a) Pelatihan dan edukasi tentang teknologi penangkaran benih yang modern dan efektif
- b) Penyediaan fasilitas dan peralatan penangkaran benih yang memadai
- c) Bantuan teknis dan pendampingan dalam proses penangkaran benih
- d) Pengembangan sistem manajemen kualitas benih yang efektif

Adapun tujuan peningkatan kapasitas penangkar benih adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas benih yang dihasilkan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman, serta meningkatkan pendapatan petani.

Dokumentasi peningkatan kapasitas penangkar benih



4. Peningkatan kompetensi pengolah produk pertanian

Pelatihan /pendampingan pengolahan produk

Kegiatan pendampingan pengolahan produk pertanian adalah proses memberikan bantuan dan dukungan kepada petani atau pelaku usaha pertanian dalam mengolah produk pertanian menjadi produk yang lebih bernilai tambah.

Tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan melaksanakan Pendampingan pengolahan produk pertanian, yang kegiatannya meliputi:

- a. Pelatihan dan edukasi tentang teknologi pengolahan produk pertanian
- b. Bantuan teknis dalam proses pengolahan produk pertanian
- c. Pengembangan produk dan kemasan yang menarik
- d. Pendampingan dalam pemasaran dan penjualan produk

Adapun tujuan dari pendampingan pengolahan produk pertanian adalah untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar

Dokumentasi Pelatihan Pengolahan Produk Pada Tanaman Karet



5. Penyaluran alat pengolahan

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan mempunyai peran dalam hal pengolahan produk pertanian, yaitu pengolahan bahan mentah menjadi bahan/barang setengah jadi yang siap untuk diolah menjadi bahan/barang jadi.

Sebagai contoh pada tanaman padi, peran Distanhorbun dalam pengolahan adalah mengolah Gabah Kering Panen (GKP) menjadi Gabah Kering Giling (GKG) dengan meminimalkan kehilangan hasil panen, salah cara yang digunakan Distanhorbun pada tahun 2025 adalah dengan penyerahan alat pengolahan / alat panen berupa Combaine (alat panen padi) sebanyak 2 unit.

Dengan Combaine (alat panen) kehilangan hasil pada waktu pengolahan GKP ke GKG bisa diminimalkan, dengan target kehilangan hasil maximal 1,2%/ha.

Dokumentasi Penyerahan Alat Pengolahan



c. Peningkatan kualitas kelembagaan kelompok tani

1. Peningkatan kompetensi kelompok tani

Dalam upaya peningkatan produksi pertanian, salah cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kompetensi kelompok tani, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan anggota kelompok tani dalam mengelola usaha pertanian yang lebih efektif dan efisien.

Tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan melakukan peningkatan kompetensi kelompok tani dengan cara :

- a. Pelatihan dan edukasi tentang teknologi pertanian modern
- b. Pendampingan oleh penyuluh pertanian
- c. Pertukaran pengalaman dan pengetahuan antar anggota kelompok tani
- d. Pengembangan sistem manajemen usaha pertanian yang efektif

Tujuan meningkatkan kompetensi kelompok tani adalah untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing produk pertanian,

serta meningkatkan pendapatan anggota kelompok tani, baik itu petani pemilik lahan, petani penggarap dan buruh tani.

Dokumentasi Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani



2. Peningkatan kualitas sdm penyuluh pertanian

Peningkatan kemampuan dan pengetahuan petugas pertanian (PPL) juga perlu dilakukan, karena Petugas Penyuluh Lapangan merupakan ujung tombak pembangunan pertanian, melalui kegiatan yang berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penyuluh pertanian dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada petani.

Cara peningkatan kualitas SDM penyuluh pertanian di tahun 2025 yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan adalah :

- a. Pelatihan dan edukasi tentang teknologi pertanian modern
- b. Pendampingan oleh ahli atau KJF Kabupaten
- c. Pertukaran pengalaman dan pengetahuan dengan penyuluh lain
- d. Pengembangan sistem manajemen pengetahuan yang efektif

Tujuan peningkatan kualitas SDM penyuluh pertanian adalah untuk meningkatkan kemampuan penyuluh dalam memberikan pelayanan yang

lebih baik kepada petani, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas pertanian.

Dokumentasi peningkatan kualitas SDM Penyuluh Pertanian



Faktor Pendorong/Keberhasilan

Berdasarkan tabel sasaran Renstra tahun 2025-2029 bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 menetapkan target rasio PDRB Sektor pertanian sebesar 5%, yang dicapai melalui pendekatan peningkatan produksi pertanian di tahun 2025.

Rasio PDRB sektor pertanian berbanding lurus dengan pertumbuhan produksi komoditas pertanian, hal ini bisa dijelaskan bahwa produksi pertanian sebagai komponen utama dalam menghitung rasio PDRB sektor pertanian, pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Panga Hortikultura dan Perkebunan tahun 2025

sebesar 5,03% atau capaian sebesar 100,6% bisa terpenuhi dikarenakan salah satunya adanya Program untuk peningkatan produksi, antara lain :

1. Komoditas padi, capaian target produksi padi di tahun 2025 sebesar 122,12% (target 144.550 ton, realisasi 176.518 ton), dapat dicapai dengan dilaksanakannya program Optimalisasi Lahan Rawa (Opla) tahun 2025 seluas 2.840,28 ha, dan adanya Program Tala Bungas, yaitu Tanah Laut Lumbung Beras, berupa kegiatan dalam upaya peningkatan produksi padi/beras dengan cara Ekstensifikasi (peningkatan indeks pertanaman) dan Intensifikasi (penggunaan benih unggul dan benih lokal umur pendek), tidak adanya kekeringan/kemarau lama sehingga kegiatan Gernas (Gerakan Nasional) percepatan tanam bisa dilaksanakan, Gernas yaitu gerakan untuk mengatur jadwal tanam yang menyesuaikan dengan keadaan iklim/cuaca, sehingga tanaman padi dan jagung bisa terpenuhi kebutuhan airnya dan dapat berkembang/tumbuh dengan baik dan tahan terhadap serangan hama penyakit tanaman, penyebab pencapaian produksi sesuai target adalah adanya bantuan saprodi berupa benih/bibit dan pupuk baik dari kementerian pertanian, maupun dari provinsi, sehingga target produksi padi di Kabupaten Tanah Laut bisa terpenuhi.
2. Komoditas jagung, capaian produksi pada tahun 2025 dengan realisasi capaian target 101,13% (target 123.305 ton, realisasi 124.693 ton), dilakukan dengan cara intensifikasi, karena banyaknya alih fungsi lahan tanaman jagung ke sawit, cara intensifikasi yaitu perubahan penggunaan benih oleh para petani jagung, dari yang sebelumnya petani menggunakan benih non unggul/lokal sekarang beralih menggunakan benih hibrida/unggul yang mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi, dengan rata-rata produktivitas 7,8 ton/ha, dan adanya bantuan sarana produksi dari kementerian pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan berupa benih, pupuk dan pestisida.
3. Komoditas Kacang Tanah, target produksi kacang tanah belum bisa memenuhi target, dari target 100 ton, realisasi hanya 50 ton atau 50% realisasi, namun walaupun kacang tanah tidak memenuhi target

produksi, pengembangan kacang tanah di tahun 2025 secara mandiri dapat berjalan dengan baik.

hal ini dapat dicapai dikarenakan adanya pendampingan dan penyuluhan secara intensif kepada petani tentang budidaya dan cara mengatasi hama penyakit pada bawang merah.

4. Komoditas Cabe, target produksi komoditas cabe tahun 2025 sebesar 2.380,90 ton dengan realisasi 2.541 ton atau melebihi target sebesar 106,72 %, hal ini disebabkan adanya program Insentif Fiskal untuk mengurangi Inflasi dan adanya penambahan area tanam cabe yang dibiayai oleh APBN dan APBD I, dan harga jual cabe yang tinggi/bagus di tahun 2025 memberikan daya tarik bagi petani untuk melakukan budidaya/tanam cabe.
5. Pada komoditas bawang merah, realisasi produksinya juga melebihi target sebesar 507,92 %, sama dengan peningkatan produksi cabe, program Insentif fiskal sangat membantu dalam peningkatan produksi bawang merah dan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dengan berkerjasama (MoU) dengan Kabupaten Probolinggo (sentra bawang merah di Jawa Timur) untuk melakukan studi tiru atau pembelajaran mengenai budidaya bawang merah yang lebih baik, dan adanya fasilitas melalui pinjam pakai di Brigade Alsintan kepada petani bawang, sehingga petani bisa mengurangi biaya produksinya dalam mengolah tanah.
6. Realisasi produksi durian melebihi target sebesar 162,60% yang dikarenakan adanya kenaikan luas area tanam durian pada tahun 2019 seluas 2 ha yang berdampak pada peningkatan produksi di tahun 2025.
7. Realisasi capaian produksi tanaman karet pada tahun 2025 sebesar 142,38%, dikarenakan adanya penambahan Tanaman Menghasilkan (TM) pada tanaman karet sebanyak 153 ha yang mengakibatkan adanya peningkatan produksi karet.
8. Harga jual kelapa sawit yang relatif stabil/baik di tahun 2025, mengakibatkan adanya alih fungsi lahan dari tanaman pangan ke perkebunan sawit, sehingga luas area tanam sawit pada tahun 2025 menjadi meningkat yang berbanding lurus dengan peningkatan produksi, sehingga produksi sawit 2025 melebihi target sebanyak

147,47%.

9. Peningkatan produksi kopi juga disebabkan adanya penambahan Tanaman Menghasilkan (TM) tanaman kopi kurang lebih sebanyak 1,2 ha pada tahun 2025 yang berdampak pada peningkatan produksi kopi. Sedangkan faktor biaya produksi juga berpengaruh pada besarnya PDRB sektor pertanian, dimana pada tahun 2025 ini biaya produksi khususnya untuk tanaman pangan (padi dan jagung) lebih rendah daripada biaya produksi tahun 2024, hal ini disebabkan adanya bantuan Sarana produksi dari Kementerian Pertanian berupa Alat dan Mesin Pertanian, Pupuk dan Benih, sehingga petani bisa menekan biaya produksi, yang biasanya rata-rata pengeluaran untuk olah tanah sebesar Rp.1.200.000.00,-/ha pada tahun 2025 rata-rata pengeluaran untuk olah tanah hanya Rp.750.000.000,-/ha.

Faktor Penghambat/Kegagalan

Faktor penghambat dalam pencapaian tujuan organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan terbagi dalam 3 Sub Komoditas, yaitu komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dengan penjelasannya :

1. Faktor Penghambat/Kendala Pada Komoditas Tanaman Pangan
 - a. Adanya perbedaan data Luas Lahan Baku Sawah (LBS) antar instansi Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Distanshortan.
 - b. Adanya alih fungsi lahan, dari komoditas tanaman pangan ke komoditas perkebunan dan hortikultura.
 - c. Harga jual jagung yang rendah, sehingga petani beralih ke komoditas lainnya.
 - d. Dampak perubahan iklim sehingga sebagian petani memilih untuk tidak menanam tanaman jagung.
 - e. Terbatasnya alokasi pupuk bersubsidi kepada petani (maksimal 2 ha/ petani) tidak mendapatkan pupuk subsidi.
2. Faktor Penghambat/Kendala Pada Komoditas Hortikultura
 - a. Pencapaian target untuk luas panen komoditas bawang merah yang tidak memenuhi target walaupun produksi memenuhi target, hal ini disebabkan adanya Dampak Perubahan Iklim berupa curah hujan yang tinggi pada awal tahun 2025, sehingga tanaman

bawang terserang penyakit Muller (busuk daun).

- b. Tanaman hias anggrek untuk dibudidayakan memerlukan iklim, suhu dan perlakuan yang sangat khusus diperlukan untuk beradaptasinya
- c. Minat petani terhadap pengembangan budidaya bawang merah masih sangat rendah, karena perawatanya yang sangat instens.
- d. Budidaya pengembangan bawang merah memerlukan biaya oprasional yang besar dari proses tanam sampai dengan panen (80 juta/ ha).

3. Faktor Penghambat/Kendala Pada Komoditas Perkebunan

- a. Adanya isu bahwa komoditas sawit adalah komoditas yang merusak lingkungan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Populasi komoditas tanaman karet dan sawit rakyat yang ada di Kabupaten Tanah Laut saat ini usianya rata-rata sudah tua.
- c. Biaya operasional pemeliharaan sawit dari proses tanam sampai dengan pembuahan cukup banyak dibandingkan dengan karet.
- d. Luas tanam karet, sawit dan kopi selalu meningkat karena adanya alih pungsilahan.
- e. Harga jual karet dan sawit sangat dipengaruhi oleh pasar global dunia.
- f. Produksi tanaman unggulan karet , sawit dan kopi dari tahun ketahun meningkat tapi belum terimbangi dengan upaya peremajaan karet, sawit, dan kopi yang dilakukan oleh petani.
- g. Petani karet dan sawit swadaya (mandiri) yang melakukan penanaman tanpa fasilitas bantuan dari Pemerintah.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

Dalam menghadapi kendala/faktor penghambat, maka diperlukan solusi dan rencana aksi yang diperlukan pada masing-masing komoditas, yaitu :

- 1. Solusi dan Rencana Aksi pada Komoditas Tanaman Pangan
Solusi Pennaganan Faktor Penghambat/Kendala pada Komoditas Tanaman Pangan, antara lain :
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait (ATR BPN dan

BPS) untuk persamaan persepsi mengenai metode yang digunakan dalam menghitung/menentukan Luas Lahan Baku Sawah (LBS).

- b. Memberikan rekomendasi berupa reward/penghargaan kepada petani yang masih mempertahankan luas tanam/masih bersedia melakukan budidaya tanaman pangan utama (padi dan jagung).
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penetapan harga jual jagung, sehingga petani tidak mengalami kerugian dan tetap melakukan budidaya/tanam jagung.
- d. Membuat sistem peringatan dini dalam menghadapi Dampak Perubahan Iklim (DPI), sehingga petani tidak mengalami kegagalan tanam dan panen.
- e. Memberikan pelatihan kepada petani untuk membuat pupuk secara mandiri dengan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar lingkungan.

Setelah didapatkan solusi untuk mengatasi kendala, maka diperlukan rencana aksi, untuk Komoditas Tanaman Pangan Rencana Aksinya berupa :

- a. Memberikan stimulus kepada para petani berupa sarana produksi pertanian sebagai reward dalam mempertahankan keberadaan lahan pertaniannya.
- b. Dukungan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan benih padi dan jagung yang berkualitas dan tahan terhadap hama penyakit dan peningkatan Indeks Pertanaman (IP).
- c. Pengadaan bantuan berupa benih sangat diharapkan berkelanjutan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia serta dukungan pembiayaan terkait dengan bantuan benih dan kegiatan pendukung yang bertanggung pembiayaan pada APBD Kabupaten Tanah Laut.
- d. Melakukan agenda penjadwalan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian dan para petani terkait pelaksanaan pertemuan, sosialisasi dan lain-lain.
- e. Berupaya untuk mengusulkan bantuan benih jagung yang berkualitas kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

2. Solusi dan Rencana Aksi pada Komoditas Tanaman Hortikultura

Solusi Penanganan Faktor Penghambat/Kendala pada Komoditas Hortikultura, antara lain :

- a. Pengaturan jadwal tanam bawang merah, sehingga komoditas tidak mengalami kelebihan dan kekurangan air.
- b. Melakukan Indeks pertanaman pada komoditas Anggrek dan pengaturan jadwal pola tanam yang sesuai dengan potensi komoditas.
- c. Memotivasi petani agar selalu nantinya berminat untuk menanam bawang merah.
- d. Melakukan dukungan swadaya dari petani bawang merah yang mempunyai modal yang besar untuk membantu petani bawang dengan modal yang kecil

Sedangkan Rencana Aksi untuk pengembangan Komoditas Hortikultura, antara lain :

- a. Dukungan pengadaan benih secara berkelanjutan terutama untuk komoditas cabe dan bawang merah dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- b. Diperlukan tenaga ahli yang profesional dalam pengembangan budidaya anggrek
- c. Melakukan bimbingan teknis terutama kepada petani bawang merah
- d. Menerapkan Program Tala Sumringah (Tanah Laut Sentra Bawang Merah) dengan sistem pola Kemitraan/Grosir luasan lahan budidaya minimal 1 ha dan pola Pemberdayaan petani/eceran dengan luas lahan budidaya bawang merah 0,25 ha, adanya dukungan bantuan benih bawang merah dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia secara berkelanjutan sharing APBD daerah pengadaan bantuan benih bawang merah.

3. Solusi dan Rencana Aksi pada Komoditas Tanaman Perkebunan

Solusi Penanganan Faktor Penghambat/Kendala pada Komoditas Perkebunan, antara lain :

- a. Perlu penjelasan/penyuluhan kepada masyarakat bahwa komoditas sawit bukan komoditas yang merusak lingkungan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

- b. Perlunya program peremajaan karet dan sawit rakyat untuk mengganti karet dan sawit yang tidak produktif dengan bibit unggul dan bersertifikat.
- c. Dukungan bantuan modal swadaya dari petani sawit sangat diperlukan.
- d. Melakukan pengendalian kepada para petani karet dan sawit yang dilaksanakan oleh penyuluh perkebunan mengenai manfaat dan keberadaan lahan perkebunan .
- e. Para petani karet dan sawit yang difasilitasi oleh penyuluh perkebunan untuk tetap berupa menjaga keutuhan perkebunannya.
- f. Para petani diharapkan dapat memahami tentang pentingnya peremajaan karet untuk dilakukan.
- g. Upaya bantuan bibit dan saprodi perlu untuk diupayakan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam mendukung pengembangan karet dan sawit.

Sedangkan Rencana Aksi untuk pengembangan Komoditas Perkebunan, antara lain :

- a. Melakukan Kajian Ilmiah bekerjasama dengan Universitas/Lembaga Penelitian mengenai isu tanaman sawit merusak lingkungan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Melakukan validasi data luas perkebunan karet yang sudah memasuki tahap peremajaan.
- c. Perlu adanya stimulan fasilitasi bantuan pupuk dari Kementerian Pertanian untuk peningkatan produksi tanaman perkebunan.
- d. Memberikan stimulan kepada para petani berupa sarana produksi pertanian.
- e. Meningkatkan kualitas mutu produk perkebunan untuk mendorong harga jual di pabrik pengolahan, dengan menerapkan Program Tala Barasih (Tanah Laut Bokar Bersih).
- f. Memberikan stimulus bantuan bibit , biaya operasional pembukaan lahan yang akan diremajakan melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
- g. Keseuaian lahan yang akan berpengaruh pada status kepemilikan lahan yang dimiliki oleh petani.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya kontribusi Komoditas Sub Sektor Pertanian di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 108 ASN pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan serta di dukung oleh 6 Program dengan Pagu Rp. 34.818.909.990,69 dan terealisasi Rp. 32.461.793.456,- atau sebesar 93,23%

Tabel 3.1.4
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.044.112.856,94	7.250.253.366,-
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	21.812.822.433,91	20.992.445.400,-
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	848.372.553,54	716.829.440,-
4	Program Perizinan Usaha Pertanian	2.851.596.949,3	2.336.279.150,-
5	Program Penyuluhan Pertanian	1.262.005.197,-	1.165.986.100,-
	JUMLAH	34.818.909.990,69	32.461.793.456,-

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

$$\text{Efisiensi} = \frac{(34.818.909.990,69 \times 100,6\%) - 32.461.793.456,-}{34.818.909.990,69} \times 100\%$$

(34.818.909.990,69 x 100,6%)

Efisiensi = 90,73%

Tabel 3.1.5
Efisiensi Sasaran Strategis 1

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100,6%	93,23%	90,73%

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah menggunakan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DPA Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

Jumlah pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sebanyak 6 program dan 14 kegiatan dengan sub kegiatan sebanyak 36 dengan pagu sebesar 60.838.187.446,08,- dengan realisasi sebesar Rp. 54.925.856.156,-, atau sebesar 90,28% dengan capaian kinerja sebesar 99,10% dengan target PDRB sektor pertanian sebesar 5% dapat tercapai (realisasi 5,03%).

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tahun 2025 terdiri dari : 6 Program, 14 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan, dengan Pagu Awal sebesar **Rp. 54.548.129.569,67,-**, Perubahan KUA dan PPAS (anggaran perubahan) sebesar **Rp. 60.838.187.446,08**, bertambah sebesar **Rp. 6.290.057.876,41** dengan rincian per Program :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pagu Awal Rp. 26.262.384.415,45, diusulkan perubahan menjadi Rp. 26.019.277.455,39 (berkurang sebesar Rp. 243.106.960,1)

- b) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Pagu Awal Rp. 3.485.211.148,- diusulkan perubahan menjadi Rp. 8.044.112.856,94 (bertambah sebesar Rp.4.558.901.708,94).
- c) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pagu Awal Rp. 18.500.593.001,- diusulkan perubahan menjadi Rp. 21.812.822.433,91 (bertambah sebesar Rp. 3.312.229.432,91).
- d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Pagu Awal sebesar Rp. 875.277.657,- diusulkan perubahan menjadi Rp. 848.372.553,54 (berkurang sebesar Rp. 26.905.103,46).
- e) Program Perizinan Usaha Pertanian, Pagu Awal sebesar Rp. 2.466.447.593,- diusulkan perubahan menjadi Rp. 2.851.596.949,30 (bertambah sebesar Rp. 385.149.356,30)
- f) Program Penyuluhan Pertanian, Pagu Awal sebesar Rp. 898.474.310,12, diusulkan perubahan menjadi Rp. 1.262.005.197,- (bertambah 363.530.886,88).



TUJUAN I

Tabel 3.6

Meningkatnya Produktivitas dan daya saing sektor unggulan daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program				
						Uraian		Anggaran	Realisasi	Persentase
								Rp	Rp	%
1	Meningkatnya kontribusi Komoditas Sub Sektor Pertanian	1	Rasio PDRB Sektor Pertanian	5%	5,03%	1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.044.112.856,94	7.250.253.366	90.13
						2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	21.812.822.433,91	20.992.445.400	96.24
						3	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	848.372.553,54	716.829.440	84.49
						4	Program Perizinan Usaha Pertanian	2.851.596.949,3	2.336.279.150	81.93
						5	Program Penyuluhan Pertanian	1.262.005.197	1.165.986.100	92.39

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan 2024

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
5	BELANJA DAERAH	60.838.187.446,08	54.925.856.156,00	90,28	55.615.224.851,00
5.1	BELANJA OPERASI	41.770.544.340,84	36.250.100.696,00	86,78	36.482.745.207,00
5.1.01	Belanja Pegawai	22.396.681.826,00	19.164.959.352,00	85,57	21.015.051.723,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.952.956.715,84	15.137.879.844,00	89,29	15.233.962.484,00
5.1.05	Belanja Hibah	2.420.905.799,00	1.947.261.500,00	80,44	233.731.000,00
5.2	BELANJA MODAL	19.067.643.105,24	18.675.755.460,00	97,94	19.132.479.644,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.036.129.193,43	963.815.460,00	93,02	2.487.902.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.020.840,00	27.056.000,00	96,56	365.054.660,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.003.493.071,81	17.684.884.000,00	98,23	16.279.522.984,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(60.838.187.446,08)	(54.925.856.156,00)	90,28	(55.615.224.851,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(60.838.187.446,08)	(54.925.856.156,00)	90,28	(55.615.224.851,00)

Sumber : Distanhorbun 2025.

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	60.838.187.446,08	54.925.856.156,00	90,28	55.615.224.851,00
5.1	BELANJA OPERASI	41.770.544.340,84	36.250.100.696,00	86,78	36.482.745.207,00
5.1.01	Belanja Pegawai	22.396.681.826,00	19.164.959.352,00	85,57	21.015.051.723,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	11.695.113.644,00	10.178.230.416,00	87,02	11.191.492.054,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.701.568.182,00	8.986.728.936,00	83,97	9.823.559.669,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.952.956.715,84	15.137.879.844,00	89,29	15.233.962.484,00
5.1.02.01	Belanja Barang	11.809.157.370,81	10.582.136.916,00	89,60	8.701.746.025,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.510.316.695,00	3.046.783.612,00	86,79	3.086.947.450,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	609.685.650,03	605.973.846,00	99,39	618.207.679,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	842.317.000,00	737.317.870,00	87,53	2.338.210.250,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	181.480.000,00	165.667.600,00	91,28	488.851.080,00
5.1.05	Belanja Hibah	2.420.905.799,00	1.947.261.500,00	80,43	233.731.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.420.905.799,00	1.947.261.500,00	80,43	233.731.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	41.770.544.340,84	36.250.100.696,00	86,78	36.482.745.207,00
5.2	BELANJA MODAL	19.067.643.105,24	18.675.755.460,00	97,94	19.132.479.644,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.036.129.193,43	963.815.460,00	93,02	2.487.902.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	384.060.000,00	340.700.000,00	88,71	397.100.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	541.763.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	130.141.074,00	117.588.960,00	90,35	124.509.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	59.450.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	121.928.119,83	114.505.500,00	93,91	69.890.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	399.999.999,60	391.021.000,00	97,75	1.295.190.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.020.840,00	27.056.000,00	96,55	365.054.660,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	28.020.840,00	27.056.000,00	96,55	365.054.660,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.003.493.071,81	17.684.884.000,00	98,23	16.279.522.984,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	16.895.423.970,81	16.592.342.000,00	98,20	16.279.522.984,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.108.069.101,00	1.092.542.000,00	98,59	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	19.067.643.105,24	18.675.755.460,00	97,94	19.132.479.644,00
	JUMLAH BELANJA	60.838.187.446,08	54.925.856.156,00	90,28	55.615.224.851,00
	SURPLUS/DEFISIT	(60.838.187.446,08)	(54.925.856.156,00)	90,28	(55.615.224.851,00)

Sumber : Distanhorbun 2025

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator adalah 100,6% dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 91%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Dalam mewujudkan pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Tanah Laut dalam upaya meningkatkan produksi, perlu dukungan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk selalu terus memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian berupa mesin dan alat-alat pertanian berupa hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana DAK, APBD Provinsi yang dapat dimanfaatkan langsung bagi para petani. Dukungan Pemerintah Daerah melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut terus berupa untuk selalu mengawal kepada para petani dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Tanah Laut dengan cara :

1. Mengupayakan pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan usahatani, jalan produksi termasuk infrastruktur yang berhubungan dengan tata kelola air.
2. Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana pertanian termasuk didalamnya fasilitasi alatmesin pertanian serta sarana produksi pertanian.
3. Fasilitasi untuk perolehan modal dengan lembagaPerbankan.
4. Meningkatkan kapasitas petani dan Sumber DayaManusia Pertanian

5. Mengupayakan peningkatan tambah luas tanam dan pengolahan lahan pertanian sesuai dengan petunjuk teknis yang dilakukan oleh para penyuluh pertanian yang dilakukan untuk kepentingan petani.
6. Pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha serta penguatan kelembagaan tani.
7. Pelaksanaan tanam dilakukan dengan lebih memperhatikan jadwal tanam yang seharusnya.
8. Pada saat penanganan pasca panen diupayakan tepat waktu dan sasaran jangan sampai ada keterlambatan dalam pemanenan.
9. Mengoptimalkan aplikasi teknologi di tingkat petani.
10. Peran para penyuluh petani lapang untuk selalu terus dioptimalisasikan keberadaannya.

Pelaihari, Februari 2026

Kepala Dinas,



Ir.M.Faried Widyatmoko

NIP.19680929 199503 1 006

LAMPIRAN

1. Capaian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural

2. Capaian Kinerja Secara Jabatan Struktural					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan					
1	Meningkatnya kontribusi Komoditas Sub Sektor Pertanian	Rasio PDRB Sektor Pertanian	5%	5,03%	100,60%
Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan					
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi	Nilai Komponen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi	A	A	A
2	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terkelolanya Admnistrasi Umpeg, Baik dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Terkelolanya administrasi keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	100%	100%
3	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dapat dimanfaatkan	100%	100%	100%
Kepala Bidang Tanaman Pangan					
1	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Produksi Pertanian			
		Padi	144.550	176.518	122,12
		Jagung	123.305	124.693	101,13
		Kacang Tanah	100	50	50,00
Kepala Bidang Hortikultura					
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi Pertanian			
		Cabe	2.380,90	2.541,0	106,72
		Bawang Merah	11,36	57,7	507,92
		Durian	50,00	81,30	162,60
2	Meningkatnya Pengembangan Tanaman Hias	Presentase Tanaman Yang Dikembangkan	1	1	100%

Kepala Bidang Perkebunan					
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi Pertanian			
		Karet	15.486,10	22.048,80	142,38
		Sawit	54.437	80.280,00	147,47
		Kopi	48	174	362,50
2	Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian	Persentase Komoditas yang diterima perusahaan	5%	5%	100%
Kepala Bidang Penyuluhan & PSP					
1	Meningkatnya SDM Penyuluh dan Kelompok Tani	Persentase SDM Penyuluh yang bersertifikat profesi (Orang)	2	2	100%
		Persentase Kelompok Tani yang Trampil (Orang)	1700	1700	100%
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase Alsintan sesuai yang dapat dimanfaatkan (Unit)	170	105	1
		Persentase Kelompok tani yang mendapat pupuk bersubsidi	21.000	21.000	100%
		Persentase Jalan Usaha Tani yang dapat dimanfaatkan (Unit)	4	4	100%
		Persentase Jalan Produksi yang dapat dimanfaatkan (Unit)	90	90	100%
Kasubag Perencanaan					
1	Meningkatnya penyusunan perencanaan yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan pada LKPJ Distanshorbun	B	B	B
		Nilai Sakip Distanshorbun	A	A	A
2	Meningkatnya penyusunan laporan kinerja yang akuntabel	Jumlah dokumen kinerja yang disusun sesuai ketentuan	7	7	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Program Aplikasi	6	6	100%

Kasubag Keuangan					
1	Meningkatnya penyusunan perencanaan administrasi keuangan dinas	Jumlah Usulan Dokumen Administrasi Keuangan	4	4	100%
		Jumlah Laporan Keuangan	1	1	100%
2	Meningkatnya penyusunan pembuatan laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran	Jumlah dokumen realisasi keuangan yg dilaporkan	12	12	100%
		Jumlah dokumen realisasi SPJ yg dipertanggung jawabkan	2,500	2,500	100%
Kasubag Umum Kepegawaian					
1	Meningkatnya perencanaan pengadaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah dokumen persyaratan surat menyurat (Dokumen)	4	4	100%
		Jumlah Administrasi kepegawaian yang dilayani secara tertib (Orang)	145	145	100%
		Jumlah Asset inventarisasi yg dikelola (Unit)	4,173	4,173	100%
		Jumlah Asset inventarisasi yg dikelola dan dihapuskan (Unit)	55	55	100%

2. Perjanjian Kinerja



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

Jl. Datu Insad No.77 Kompleks Perkantoran Gagas Pelaihari

Email: distanbun77@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. M.FARIED WIDYATMOKO

Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. RAHMAT TRIANTO

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

H. RAHMAT TRIANTO

PIHAK PERTAMA

Ir. M.FARIED WIDYATMOKO
NIP 196809291995031006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya Kontribusi Komoditas Sektor Pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan)	Rasio PDRB Sektor Pertanian	5 %
2	-	-	-

	Program	Anggaran
	Program	
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.044.112.858
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	21.812.822.435
3	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	848.372.554
4	Program Perizinan Usaha Pertanian	2.851.596.949
5	Program Penyuluhan Pertanian	1.262.005.197
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.019.277.456

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



H. RAHMAT TRIANTO



Ir. M.FARIED WIDYATMOKO
NIP.196809291995031006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leni Sari Indrawati, A.KS
Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. M. Faried Widyatmoko
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Selanjutnya atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini ada mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

Kepala Dinas

Ir. M. Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006

Sekretaris

Leni Sari Indrawati, A.KS
NIP. 19761008 2000003 2 005

Lampiran Perjanjian Kinerja tahun 2025
Sekretaris
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut

No	Kinerja Utama	Indikator Kerja	Target
1	Meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD	Nilai Reformasi Birokrasi	B
2	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum, Kepegawaian Perencanaan dan Keuangan	Nilai SAKIP	A
		Persentase Terkelolanya Administrasi Umum, Kepegawaian yang baik dan tepat waktu	100 %
		Persentase Terkelolanya Administrasi Perencanaan yang baik dan tepat waktu	100 %
		Persentase Terkelolanya Administrasi Keuangan yang baik dan tepat waktu	100 %
3	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor yang dikelola dan dapat dimanfaatkan	100 %

No	Program	Anggaran
1	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp. 26.019.277.455,39

Pelaihari, 2 September 2025

Kepala Dinas



Ir. M. Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006

Sekretaris



Leni Sari Indrawati, A.KS
NIP. 19761008 2000003 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Muhammad Fahrizal, SP
Jabatan : Kabid Tanaman Pangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. M. Faried Widyatmoko
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Selanjutnya atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini ada mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

Kepala Dinas

Ir. M. Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006

Kabid Tanaman Pangan

H. Muhammad Fahrizal, SP
NIP. 19810310 201001 1 027

Lampiran Perjanjian Kinerja tahun 2025
Kabid Tanaman Pangan
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut

No	Kinerja Utama	Indikator	Target
1	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Produksi Pertanian 1. Padi 2. Jagung 3. Kacang Tanah	144.300 Ton 123.136 Ton 100 Ton

No	Program/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp. 6.937.276.562,50
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Sub. Kegiatan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Rp. 237.962.500,00
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan. Hortikultura dan Perkebunan	Rp. 244.506.416,00
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp. 128.440.000,00

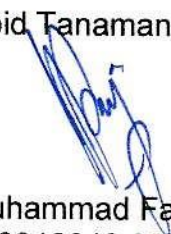
Pelaihari, 2 September 2025

Kepala Dinas



Ir. M. Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006

Kabid Tanaman Pangan



H. Muhammad Fahrizal, SP
NIP. 19810310 201001 1 027



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggraini Fajriyah, S.Pi, M.Si
Jabatan : Kabid Hortikultura

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. M. Faried Widyatmoko
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Selanjutnya atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini ada mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

Kepala Dinas

Ir. M. Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006

Kabid Hortikultura

Anggraini Fajriyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19790126 200801 2 011

Lampiran Perjanjian Kinerja tahun 2025
Kabid Hortikultura
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut

No	Kinerja Utama	Indikator	Target
1	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Produksi Pertanian 1. Cabe 2. Bawang Merah 3. Durian	2.370,10 Ton 11.231 Ton 50 Ton
2	Meningkatnya Pengembangan Tanaman Hias	Persentase tanaman hias yang dikembangkan anggrek	1 tanaman

No	Program/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.	Rp. 910.441.396,76
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Rp. 78.615.794,00
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rp. 128.930.873,00
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp. 142.157.070,00

Pelaihari, 2 September 2025

Kepala Dinas



Ir. M. Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006

Kabid Hortikultura



Anggraini Fajriyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19790126 200801 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jl. Datu Insad No. 77 Angsau 70814 Telp. 0512-21008 Fax. (0512) 22882 - Pelaihari
Email : distanbun77@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Supriyanto Prihatin, SP., M.P
Jabatan : Plt. Kabid Perkebunan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. M. Faried Widyatmoko
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Selanjutnya atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini ada mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

Kepala Dinas

Ir. M. Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006

Plt. Kabid Perkebunan

Supriyanto Prihatin, SP., M.P
NIP. 19850409 201101 1 003

Lampiran Perjanjian Kinerja tahun 2025
Kabid Perkebunan
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut

No	Kinerja Utama	Indikator	Target
1	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Produksi Pertanian Karet Sawit Kopi	15.182,30 Ton 52.920,21 Ton 48 Ton
2	Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian	Persentase komoditas yang diterima perusahaan / pasar	5%

No	Program Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rp. 107.726.727,00
2.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp. 97.061.486
3.	Program Perizinan Usaha Pertanian Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Petanian	Rp. 2.851.596.949,30

Pelaihari, 2 September 2025

Kepala Dinas



Ir. M. Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006

Plt. Kabid Perkebunan



Supriyanto Prihatin, SP., M.P
NIP. 19850409 201101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jl. Datu Insad No. 77 Angsau 70814 Telp. 0512-21008 Fax. (0512) 22882 - Pelaihari
Email : distanbun77@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarko, S.Pt
Jabatan : Kabid Penyuluhan & PSP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. M. Faried Widyatmoko
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Selanjutnya atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini ada mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

Kepala Dinas

Ir. M. Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006

Kabid Penyuluhan & PSP

Sunarko, S.Pt
NIP. 19700611 199303 1 005

Lampiran Perjanjian Kinerja tahun 2025

Kabid Penyuluh & PSP
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut

No	Kinerja Utama	Indikator	Target
1	Meningkatnya SDM Penyuluh dan Kelompok Tani	Persentase SDM penyuluh yang bersertifikat profesi	2 Orang
		Persentase kelompok tani yang terampil	1.700 Kelompok
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kelompok Tani	Presentase Meningkatnya Kelas Kelompok Tani	10%

No	Program kegiatan	Anggaran
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Sub. Kegiatan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Rp. 1.819.326.862,50
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Rp. 635.133.776,00
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp. 18.056.123.970,81
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rp. 1.051.365.324,60
5	Program Penyuluh Pertanian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.	Rp. 962.005.197,00

Pelaihari, 2 September 2025

Kepala Dinas



Ir. M. Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006

Kabid Penyuluhan & PSP



Sunarko, S.Pt
NIP. 19700611 199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jl. Datu Insad No. 77 Angsau 70814 Telp. 0512-21008 Fax. (0512) 22882 - Pelaihari
Email : distanbun77@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Supriyanto Prihatin, SP., M.P
Jabatan : Kasubag Perencanaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Leni Sari Indrawati, A.KS
Jabatan : Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Selanjutnya atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini ada mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

Sekretaris

Leni Sari Indrawati, A.KS
NIP. 19761008 200003 2 005

Kasubbag Perencanaan

Supriyanto Prihatin, SP., M.P
NIP. 19850409 201101 1 003

Lampiran Perjanjian Kinerja tahun 2025
Kasubbag Perencanaan
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut

No	Kinerja Utama	Indikator	Target
1	Meningkatnya penyusunan perencanaan yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan pada LKPJ Distanhorbun	B
		Nilai komponen perencanaan pada SAKIP Distanhorbun	A
2	Meningkatnya penyusunan laporan kinerja yang akuntabel	Jumlah dokumen kinerja yang disusun sesuai ketentuan	7 Dokumen
		Jumlah dokumen perencanaan program aplikasi	6 Aplikasi

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 7.998.360,30
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp. 7.095.751,59

Pelaihari, 2 September 2025

Sekretaris

Kasubag Perencanaan



Leni Sari Indrawati, A.KS
NIP. 19761008 200003 2 005

Supriyanto Prihatin, SP., M.P
NIP. 19850409 201101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jl. Datu Insad No. 77 Angsau 70814 Telp. 0512-21008 Fax. (0512) 22882 - Pelaihari
Email : distanbun77@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulianti, S.Sos
Jabatan : Kasubbag keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Leni Sari Indrawati, A.KS
Jabatan : Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Selanjutnya atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini ada mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

Sekretaris

Leni Sari Indrawati, A.KS
NIP. 19761008 200003 2 005

Kasubbag Keuangan

Yulianti, S.Sos
NIP. 19740716 200701 2 012

Lampiran Perjanjian Kinerja tahun 2025
Kasubbag Keuangan
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut

No	Kinerja Utama	Indikator	Target
1	Meningkatnya penyusunan perencanaan administrasi keuangan dinas	Jumlah usulan dokumen administrasi keuangan	4 Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokumen
2	Meningkatnya penyusunan pembuatan laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran	Jumlah dokumen realisasi keuangan yang dilaporkan	12 Dokumen
		Jumlah dokumen realisasi SPJ yang dipertanggung jawabkan	2,500 Berkas

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 22.396.681.826
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 7.998.359,90

Pelaihari, 2 September 2025

Sekretaris



Leni Sari Indrawati, A.KS
NIP. 19761008 200003 2 005

Kasubbag Keuangan



Yulianti, S.Sos
NIP. 19740716 200701 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jl. Datu Insad No. 77 Angsau 70814 Telp. 0512-21008 Fax. (0512) 22882 - Pelaihari
Email : distanbun77@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elli Nuryanti, A.Md
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Leni Sari Indrawati, A.KS
Jabatan : Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Selanjutnya atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini ada mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

Sekretaris

Kasubbag Umum Kepegawaian

Leni Sari Indrawati, A.KS
NIP. 19761008 200003 2 005

Elli Nuryanti, A.Md
NIP. 19861111 201001 2 017

Lampiran Perjanjian Kinerja tahun 2025
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut

No	Kinerja Utama	Indikator	Target
1	Meningkatnya perencanaan pengadaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah dokumen persyaratan surat menyurat	4 Dokumen
		Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dilayani secara tertib	145 Orang
		jumlah asset inventaris yang dikelola	4.173 Unit
		jumlah asset inventaris yang dihapuskan	55 Bh

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 21.995.968
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp. 276,579,189.64
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 19.997.813
4	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 37,164,911.90
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 3.960.000
6	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 370,435,000
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Rp. 286,000,000
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Rp. 1.368.009.652
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 31.000.000
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 378,000,000
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 39,860,000

Pelaihari, 2 September 2025

Sekretaris



Leni Sari Indrawati, A.KS
NIP. 19761008 200003 2 005

Kasubbag Umum Kepegawaian



Elli Nuryanti, A.Md
NIP. 19861111 201001 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jl. Datu Insad No. 77 Angsau 70814 Telp. 0512-21008 Fax. (0512) 22882 - Pelaihari
Email : distanbun77@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rachmawati, SP
Jabatan : Analis Pasar Hasil Pertanian Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Anggraini Fajriyah, S.Pi, M.Si
Jabatan : Kabid Hortikultura

Selanjutnya atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

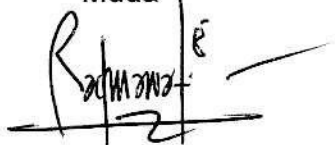
Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini ada mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

Kabid Hortikultura


Anggraini Fajriyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19790126 200801 2 011

Analisis Pasar Hasil Pertanian
Muda


Rachmawati, SP
NIP. 19820419 200903 2 010

Lampiran Perjanjian Kinerja tahun 2025
Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut

No	Kinerja Utama	Indikator	Target
A	KINERJA UTAMA		
1	Menyusun rencana kerja organisasi	Jumlah Laporan	1 laporan
2	Menyusun rencana/metode kerja pengumpulan/pengolahan data	Jumlah Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan
2	Mengorganisasikan proses pengumpulan data	Jumlah Surat Penugasan	1 Surat Tugas
3	Mengumpulkan informasi kualitatif(data primer) sebagai bahan pendukung analisis melalui wawancara dengan tenaga ahli	Jumlah wawancara	1 laporan
4	Melaksanakan analisis data pemasaran (Analisis Supply-Demand)	Jumlah Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan	1 laporan
5	Menyusun format/rancangan pengembangan pelayanan informasi pasar	Jumlah Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan	1 laporan
6	Melaksanakan Sosialisasi Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar	Jumlah Sosialisasi	1 laporan
B	KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HORTIKULTURA		
1	Sosialisasi Fasilitas bantuan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hortikultura	Jumlah Kelompok Tani Yang mendapatkan bantuan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hortikultura	2 kali Sosialisasi
2	Bimtek Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah Bimtek terlaksana	4 Kecamatan
3	Rapat Koordinasi KWT Tingkat Kecamatan	Jumlah Rakor terlaksana	11 Kecamatan 23q
4	Pelatihan Pengolahan Hasil Hortikultura Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)	Jumlah Pelatihan terlaksana	3 Desa

No	Program/Sub Kegiatan
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.

Kabid Hortikultura


Anggraini Fajriyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19790126 200801 2 011

Pelaihari, 2 September 2025
Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda


Rachmawati, SP
NIP. 19820419 200903 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jl. Datu Insad No. 77 Angsau 70814 Telp. 0512-21008 Fax. (0512) 22882 - Pelaihari
Email : distanbun77@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Supiadi, SP
Jabatan : Pengawas Benih Tanaman Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Anggraini Fajriyah, S.Pi, M.Si
Jabatan : Kabid Hortikultura

Selanjutnya atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini ada mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

Kabid Hortikultura


Anggraini Fajriyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19790126 200801 2 011

Pengawas Benih Tanaman Muda


Supiadi, SP
NIP. 19750209 200501 1 009

Lampiran Perjanjian Kinerja tahun 2025
Pengawas Benih Tanaman Muda
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut

No	Kinerja Utama	Indikator	Target
A	KINERJA UTAMA		
1	Menyusun Rencana Kerja Pengawasan Benih Tanaman Komoditas Hortikultura	Jumlah Laporan	1 Dokumen
2	Mengumpulkan dan mengolah data Pengawas Benih Tanaman Komoditas Hortikultura	Jumlah Laporan	1 Dokumen
3	Melaksanakan Pembinaan terhadap Produsen/Penangkar/Pengedar Benih	Jumlah Kegiatan	24 Kegiatan
4	Memantau Stok dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura	Jumlah Kegiatan	12 Kegiatan
B	KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN DAN PERBENIHAN HORTIKULTURA		
1	Melaksanakan Pertemuan Koordinasi Petugas POPT	Jumlah Pertemuan	6 Kali
2	Melaksanakan Pendampingan Laboratorium Kultur Jaringan	Jumlah Kegiatan	48 Kegiatan
3	Melaksanakan Pelatihan Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Jumlah Barang	3 Laporan

No	Program/Sub Kegiatan
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pelaihari, 2 September 2025

Kabid Hortikultura


Anggraini Fajriyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19790126 200801 2 011

Pengawas Benih Tanaman Muda


Supiadi, SP
NIP. 19750209 200501 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jl. Datu Insad No. 77 Angsau 70814 Telp. 0512-21008 Fax. (0512) 22882 - Pelaihari
Email : distanbun77@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rachmawati, SP
Jabatan : Analis Pasar Hasil Pertanian Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Anggraini Fajriyah, S.Pi, M.Si
Jabatan : Kabid Hortikultura

Selanjutnya atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

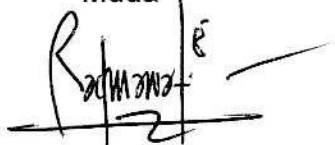
Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini ada mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

Kabid Hortikultura


Anggraini Fajriyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19790126 200801 2 011

Analis Pasar Hasil Pertanian
Muda


Rachmawati, SP
NIP. 19820419 200903 2 010

Lampiran Perjanjian Kinerja tahun 2025
Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut

No	Kinerja Utama	Indikator	Target
A	KINERJA UTAMA		
1	Menyusun rencana kerja organisasi	Jumlah Laporan	1 laporan
2	Menyusun rencana/metode kerja pengumpulan/pengolahan data	Jumlah Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan
2	Mengorganisasikan proses pengumpulan data	Jumlah Surat Penugasan	1 Surat Tugas
3	Mengumpulkan informasi kualitatif(data primer) sebagai bahan pendukung analisis melalui wawancara dengan tenaga ahli	Jumlah wawancara	1 laporan
4	Melaksanakan analisis data pemasaran (Analisis Supply-Demand)	Jumlah Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan	1 laporan
5	Menyusun format/rancangan pengembangan pelayanan informasi pasar	Jumlah Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan	1 laporan
6	Melaksanakan Sosialisasi Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar	Jumlah Sosialisasi	1 laporan
B	KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HORTIKULTURA		
1	Sosialisasi Fasilitas bantuan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hortikultura	Jumlah Kelompok Tani Yang mendapatkan bantuan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hortikultura	2 kali Sosialisasi
2	Bimtek Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah Bimtek terlaksana	4 Kecamatan
3	Rapat Koordinasi KWT Tingkat Kecamatan	Jumlah Rakor terlaksana	11 Kecamatan 23q
4	Pelatihan Pengolahan Hasil Hortikultura Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)	Jumlah Pelatihan terlaksana	3 Desa

No	Program/Sub Kegiatan
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.

Kabid Hortikultura


Anggraini Fajriyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19790126 200801 2 011

Pelaihari, 2 September 2025
Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda


Rachmawati, SP
NIP. 19820419 200903 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jl. Datu Insad No. 77 Angsau 70814 Telp. 0512-21008 Fax. (0512) 22882 - Pelaihari
Email : distanbun77@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Suprayitno, AMG
Jabatan : Analis Pasar Hasil Pertanian Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Supriyanto Prihatin, SP., M.P
Jabatan : Plt. Kabid Perkebunan

Selanjutnya atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini ada mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

Plt. Kabid Perkebunan

Analis Pasar Hasil Pertanian Muda


Supriyanto Prihatin, SP., M.P
NIP. 19850409 201101 1 003


Agus Suprayitno, AMG
NIP. 19760429 200012 1 001

Lampiran Perjanjian Kinerja tahun 2025
Pengawas Benih Tanaman Muda
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut

No	Kinerja Utama	Indikator	Target
1	Peningkatan perbaikan mutu panen, pengolahan, pemasaran hasil dan kemitraan perkebunan rakyat	Jumlah UPPB yang menggunakan pembeku yang dianjurkan pemerintah	18 UPPB
	Melakukan Pembentukan UPPB	Jumlah UPPB yang terbentuk di Kabupaten Tanah Laut	6 UPPB
	Tertindaklanjuti pemberian surat tanda terima registrasi UPPB terhadap kelompok tani karet kelompok petani karet	Jumlah UPPB yang terdaftar/terregistrasi	8 UPPB
	Melakukan kemitraan UPPB dengan pabrik crumb rubber	Jumlah UPPB yang bermitra dengan pabrik crumb rubber	18 UPPB

No	Program Kegiatan
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.
2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan. Hortikultura dan Perkebunan

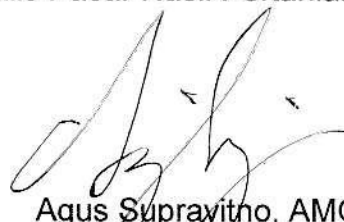
Pelaihari, 2 September 2025

Plt. Kabid Perkebunan



Supriyanto Prihatin, SP., M.P
NIP. 19850409 201101 1 003

Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda



Agus Suprayitno, AMG
NIP. 19760420 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jl. Datu Insad No. 77 Angsau 70814 Telp. 0512-21008 Fax. (0512) 22882 - Pelaihari
Email : distanbun77@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kadri Sarwito, SP
Jabatan : Analis Ketahanan Pangan Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sunarko, S.Pt
Jabatan : Kabid Penyuluhan & PSP

Selanjutnya atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini ada mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

Kabid Penyuluhan & PSP

Sunarko, S.Pt
NIP. 19700611 199303 1 005

Analisis Ketahanan Pangan Muda

Kadri Sarwito, SP
NIP. 19791104 200903 1 003

Lampiran Perjanjian Kinerja tahun 2025
Analisis Ketahanan Pangan Muda
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
A	KINERJA UTAMA		
1	Mengolah dan Meanalisis data/informasi ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen
2	Menyusun Bahan Informasi di Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen
3	Melakukan penyusunan pedoman/panduan/petunjuk/pelaksanaan/petunjuk teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan pangan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen
4	Menyusun Bahan Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen
B	TUGAS TAMBAHAN PENANGGUNG JAWABAN TUGAS POKOK PENGELOLAAN LAHAN, IIRIGASI DAN PEMBIAYAAN		
1	Melaksanakan Penyiapan Bahan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Terkait Pengelolaan Lahan dan Air	Jumlah Terbangunnya Jalan Produksi (JP)	48 Paket
		Jumlah Terbangunnya Jalan Usaha Tani (JUT)	23 Paket
		Jumlah pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengelolaan lahan dan irigasi	84 Kali
		Jumlah Terbangunnya Jaringan Irigasi Usaha Tani	3 Unit
		Jumlah Terbangunnya Embung Pertanian	3 Unit
		Jumlah Rencana Anggaran Kegiatan (RKA) tahun berikutnya	4 Dokumen

No	Program/ Kegiatan
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Sub. Kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2P
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian - Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigas Usaha Tani - Sub Kegiatan Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian

Pelaihari, 2 September 2025

Kabid Penyuluhan & PSP

Analisis Ketahanan Pangan Muda


Sunarko, S.Pt
NIP. 19700611 199303 1 005


Kadri Sarwito, SP
NIP. 19791104 200903 1 003

3. SK Indikator Kinerja Utama



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

Jalan Datu Insad No. 77 Angsau 70814 Telp. (0512) 21008 Fax. (0512) 22882 - Pelaihari
Email : distanbun77@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 210 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS
TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN
TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029**

BUPATI TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. Bahwa demi menjadi pedoman sebagaimana mana maksud pada huruf a maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan pembangunan priode tahun 2025 – 2029 di pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara konsisten dan berkesinambungan perlu dituangkan dalam suatu indikator kinerja utama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 _ tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 _ tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 45)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Priode 2025-2029 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menjadi acuan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode 2025-2029

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 21 Februari 2025

a.n. BUPATI TANAH LAUT
Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Tanah Laut



Ir. M. Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006

Tembusan Yth:
Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 210 Tahun 2025
TANGGAL : 21 Februari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT

Kabupaten : Tanah Laut
 Nama SKPD : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
 Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang diberikan kepada daerah.
 Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 c. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 d. Pelaksanaan administrasi Dinas
 e. Pembinaan UPT Dinas
 f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Kontribusi PDRB Sub Sektor Pertanian	Rasio PDRB Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	PDRB Sektor Pertanian = $\frac{\text{Nilai Tambah Bruto}}{\text{Biaya Antara}}$	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a.n. BUPATI TANAH LAUT

Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan



M. FARIED WIDAYATMOKO
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP 19680929 199503 1 006

4. Rencana Aksi Tahun 2025

REALISASI RENCANA AKSI TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Indikator	Anggaran
	Meningkatnya Kontribusi Komoditas Sektor Pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan)	Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	5						28.261.206.790
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura)		4,5	4.481.318.669
							Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura)		4,5	
						Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Capaian Pengawasan Sarana Pertanian	1	100	4.381.155.815
						Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Luas Indeks Pertanaman	Ha	10	508.829.252
							Jumlah kelompok tani penerima sarana produksi	kelompok	3	
						Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Luas Indeks Pertanaman	Ha	10	3.872.326.563
							Jumlah bibit / benih yang tersedia	Kg	500	
							Jumlah alat mesin pertanian yang tersedia	unit	1	
							Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan	Orang	8	
						Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase capaian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	%	100	100.162.854
						Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Varietas Unggul yang tersertifikasi	Dokumen	1	56.347.060
							Jumlah Fasilitasi pendaftaran HAKI	Dokumen	1	
						Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Varietas Unggul Baru (VUB)	1	43.815.794
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Peningkatan Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)		6,8	19.244.416.391
						Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Capaian Pengembangan Prasarana Pertanian	1	100	2.085.769.569
						Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen	2	2.072.859.569

					Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1	12.910.000
					Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Capaian Pembangunan Prasarana Pertanian	1	100	17.158.646.822
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3	635.133.776
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	88	15.872.147.721
						Jumlah pertanian yang dibangun	unit	1	
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	3	651.365.325
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	%	6,8	798.382.982
					Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase capaian Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1	100	798.382.982
					Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas Lahan Yang Terkendali Serangan Hama	Ha	60	420.509.185
						jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	kelompok	10	
						jumlah sarana pembasmi hama yang bisa dimanfaatkan	unit	3	
					Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas Lahan terserang yang tertangani	Ha	1000	377.873.797
						Jumlah Laporan koordinasi	laporan	1	
					PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Presentase komoditas yang diteirna perusahaan/pasar	%	5	2.851.608.949
					Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	100	2.851.608.949
					Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah pengolah produk yang terlatih	kelompok	30	2.851.608.949
						Jumlah Kerjasama Kemitraan	Dokumen	1	

						Jumlah Produk Pertanian yang Dipromosikan	Komoditas	1	
						Jumlah Pengolah Produk yang terlatih	Kelompok	3	
						Jumlah Penyalur Alat Pengolahan	Unit	1	
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok tani	%	10	885.479.799
					Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		100	885.479.799
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok Tani Yang Terbentuk	Kelompok	11	484.500.000
						Jumlah Kelompok Tani Yang Terlatih	Kelompok	11	
						Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina	Kelompok	1750	
						Jumlah Pelatihan SDM Penyuluh Pertanian	Orang	165	
						Jumlah Sertifikasi SDM Penyuluh Pertanian Yang Diikuti	Unit	1	
					Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	1	100.979.799
					Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Dokumen	1	300.000.000
-	-	-	-	0					25.883.099.180
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	80,5	25.883.099.180
						Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	Persen	83	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	100	13.594.557
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)		6	7.998.360
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	6	5.596.197

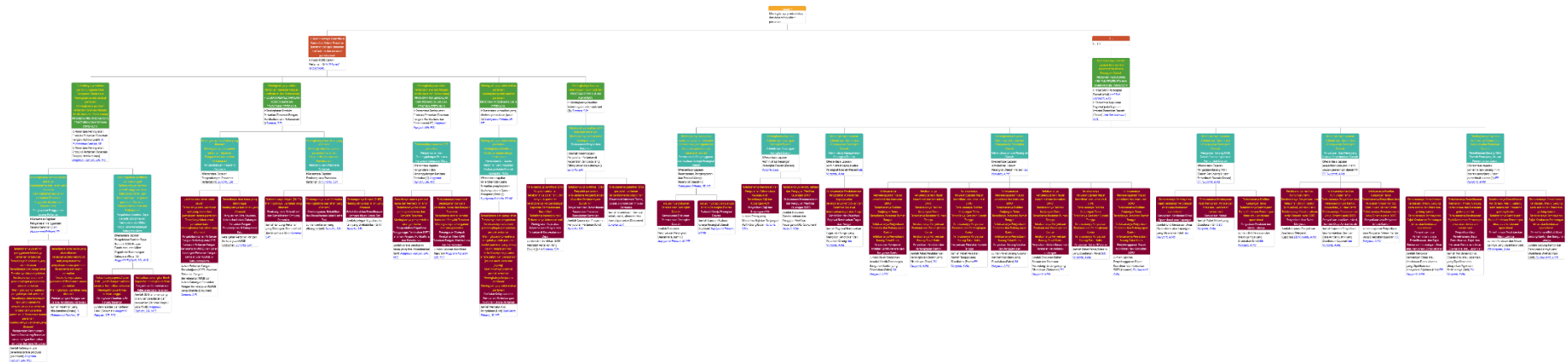
						Perangkat Daerah			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	22.404.680.186
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	133	22.396.681.826
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	42	7.998.360
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	50.000.000
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	50.000.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	586.119.796
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	21.995.968
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	276.662.588
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	19.997.813
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	27.948.427
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Dokumen	1	3.960.000
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	15.000.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	220.555.000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	620.558.499

					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	513.597.000
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	53	96.971.499
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	9.990.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1	100	1.645.659.652
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.650.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	276.000.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.368.009.652
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1	100	562.486.490
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	31.000.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	96	316.000.000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	38	26.640.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	188.846.490

5. Pohon Kinerja



6. Cascading Kinerja



7. LHE AKIP Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT **INSPEKTORAT**

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Telepon (0512) 22384 Pos-el inspekturtanahlaut@gmail.com
Laman <https://inspektorat.tanahlautkab.go.id>

Pelaihari, 29 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.1/214/LHE AKIP/Insp/ 2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 2 (Dua) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut
di

Pelaihari

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja Tahun 2025;
- b. Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
- c. Pelaporan Kinerja Tahun 2024;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

- a. Renstra SKPD tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra tahun 2025-2029;
- b. Renja SKPD tahun 2025;
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 dan 2025 ;
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025;
- f. *Cascading*;
- g. Pohon Kinerja;
- h. Laporan Kinerja tahun 2024;
- i. Dokumen lain yang mendukung.

4. Hasil evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/312/Insp/2025 tanggal 28 Juli 2025. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform).
2	A	> 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin

			perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar 82,30 dengan predikat **“A”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Memuaskan”**.

Akuntabilitas yang memuaskan ditandai dengan terwujudnya gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang di nilai	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2024	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2025
a. Perencanaan Kinerja	30	24,60	25,50
b. Pengukuran Kinerja	30	24,60	24,00
c. Pelaporan Kinerja	15	12,75	12,30
d. Evaluasi Internal	25	20,00	20,50
Nilai Hasil Evaluasi		81,95	82,30
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

5. Catatan Hasil evaluasi

Catatan atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **25,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut telah menyusun perencanaan kinerja secara memadai. Dokumen perencanaan kinerja disusun dengan baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu:

- 1) Penentuan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 belum mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu pada indikator kinerja nilai SAKIP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, dengan uraian perbandingan sebagai berikut:

Tabel perbandingan target PK 2025 dan capaian 2024

Indikator Kinerja	Target PK Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2024
Nilai SAKIP	BB	81,95 (A)

- 2) Target dan realisasi dari indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut tahun sebelumnya tidak menjadi acuan dalam penentuan target kinerja tahun berikutnya.

Tabel perbandingan target/realisasi indikator kinerja tahun 2024 dan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2024 (LKj Tahun 2024) (ton)	Realisasi 2024 (LKj Tahun 2024) (ton)	Target 2025 (PK Tahun 2025) (ton)
Jumlah produksi pertanian (ton)			
Padi	144.300,00	169.270,00	144.550,00
Jagung	123.136,00	123.739,00	123.305,00
Bawang Merah	11,23	120,00	11,36
Cabe	2.370,10	2.857,00	2.380,90
Karet	15.182,30	21.354,00	15.486,10
Sawit	52.920,21	75.235,00	54.437,37

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Pada komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

- 1) Pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan telah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan E-kinerja namun pada implementasi dalam penilaian SKP bulanan, umpan balik (*feedback*) dari pimpinan hanya berupa simbol “jempol” belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya. Hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar.
- 2) Pemantauan kinerja sebagian hanya menggambarkan besaran realisasi keuangan dan ketika ada perubahan rencana kerja tidak disertai alasan perubahan nya dan belum sepenuhnya berdasarkan analisis capaian kinerja pertriwulan yang berpengaruh pada penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,30** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut telah membuat Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024. Laporan kinerja

tersebut telah menyajikan realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 telah dipublikasikan melalui *website* PPID dan esr menpan.

Pada komponen pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

- 1) Laporan kinerja telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal ini terlihat pada Laporan Kinerja tahun 2024 indikator nilai SAKIP realisasi 81,95 nilai atau kategori predikat A, sedangkan pada target PK tahun 2025 hanya menargetkan kategori predikat BB yang artinya lebih rendah dari capaian tahun 2024.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal dalam meningkatkan capaian *output* dan capaian *outcome*. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **20,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu telah seluruhnya ditindaklanjuti. Namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan capaian *output* dan *outcome* kinerja perangkat daerah, hal ini ditunjukkan dengan target kinerja tahun 2025 yang tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan target kinerja tahun berikutnya dengan kondisi dan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta analisis yang objektif agar target yang ditetapkan bersifat *SMART* (*Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*). Selain itu, perlu dibangun mekanisme

pengendalian internal agar tidak terjadi perbedaan angka target pada dokumen yang berbeda untuk tahun yang sama;

- b. Melakukan pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan dengan memberikan umpan balik (*feedback*) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya;
- c. Laporan Kinerja berkala maupun tahunan yang telah disusun agar digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya;
- d. Agar segera menyusun rencana aksi tindak lanjut dan menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi tahun 2025 serta menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja per triwulan tahun 2025 dengan melakukan input dokumen nya pada aplikasi Simpun.

7. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga mempertimbangkan atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah diberikan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut evaluasi AKIP tahun sebelumnya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan melakukan upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Dokumen perencanaan kinerja telah tersusun dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah mengkonsultasikan pohon kinerja dengan Bapperida dan melampirkan pohon kinerja terbaru pada dokumen perencanaan kinerja;
3. Monitoring dan evaluasi kinerja telah dilakukan secara berkala dan berjenjang.

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.



Pt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025**

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	DISTANHORBUN	
			Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		25,50
1.1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40
1.2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	A	8,10
1.3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12,00
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		24,00
2.1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	BB	4,80
2.2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	BB	7,20
2.3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		12,30
3.1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,70
3.2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	BB	3,60
3.3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	BB	6,00

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	DISTANHORBUN	
			Jawaban	Nilai
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		20,50
4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	A	4,50
4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	BB	6,00
4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10,00
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA				82,30
KESIMPULAN				A
INTERPRESTASI				Memuaskan



Plt Inspektur,

Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE

Pembina (IV/a)

NIP. 19770223 200604 2 009

Dokumen yang menjadi perhatian:**a. Perencanaan Kinerja****1) Penentuan target Perjanjian Kinerja 2025****Renstra 2024-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023 (Ton)	2024 (Ton)	2025 (Ton)	2026 (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Meningkatnya Kinerja tata Kelola Distanhorbun yang Akuntabel	NILAI SAKIB DISTANHORBUN	BB	80,01	82,00	83,00	85,00

Rancangan renstra 2025-2029

NPSK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Meningkatnya Kinerja Tata Kelola DTPHortibun Yang Akuntabel	Nilai SAKIP DTPHortibun	80,01	80,01	80,5	82	82,02	82,05	83

Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024**4. Hasil evaluasi**

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar **81,95 dengan predikat "A"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Memuaskan"**, Terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

Perjanjian Kinerja tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat daerah : Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Produksi Pertanian 1. Padi 2. Jagung 3. Cabe 4. Bawang Merah 5. Karet 6. Kelapa Sawit	144.300 Ton 123.136 Ton 2.370,10 Ton 11,231 Ton 15.182,30 Ton 52.920,21 Ton
2	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas	Nilai SAKIP	BB

2) Kesesuaian target kinerja

Lkj Tahun 2024 yang memuat target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel Sasaran RPD dan Pencapaian IKU Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Jumlah produksi pertanian (ton) • Padi • Jagung • Bawang Merah • Cabe • Karet • Sawit	144.300 123.136 11,23 2.370,10 15.182,30 52.920,21	169.270 123.739 120 2.857 21.354 75.235	117,30% 100,49% 1068,57% 120,54% 140,65% 142,17%

Sumber Data : Distanhorbun 2024

Perjanjian Kinerja tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat daerah : Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Produksi Pertanian 1. Padi 2. Jagung 3. Cabe 4. Bawang Merah 5. Karet 6. Kelapa Sawit	144.300 Ton 123.136 Ton 2.370,10 Ton 11,231 Ton 15.182,30 Ton 52.920,21 Ton

b. Pengukuran Kinerja

Feedback Kinerja

Umpan balik (*feedback*) dari pimpinan hanya berupa simbol “jempol” belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja.

ASIL KERJA						
0	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TAMA						
1	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Hasil Produksi Pertanian	100%	Penguatan Internal	100% berdasarkan google drive	Pimpinan: 👍
2	Optimalnya Pemasaran Produksi Pertanian	Presentase produksi hasil pertanian yang dipasarkan	100%	Penguatan Internal	100% berdasarkan google drive	Pimpinan: 👍
3	Optimalnya Mutu Hasil Perkebunan	Presentase Komoditas unggulan perkebunan yang diterima perusahaan pengolahan kelapa sawit dan karet	100%	Penguatan Internal	100% berdasarkan google drive	Pimpinan: 👍
4	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Presentase Sarana dan Prasarana yang sesuai standar	100%	Penguatan Internal	100% berdasarkan google drive	Pimpinan: 👍
5	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Distanhorbun yang Akuntabel	Nilai SAKIP Distanhorbun	B	Penguatan Internal	B berdasarkan google drive	Pimpinan: 👍
IMBAHAN						
KINERJA HASIL KERJA						

c. Pelaporan Kinerja

1) Hasil evaluasi Sakip tahun 2024 dan target nilai Sakip tahun 2025

Nilai Sakip tahun 2024

4. Hasil evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar **81,95 dengan predikat “A”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Memuaskan”, Terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

Target nilai Sakip Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat daerah : Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Produksi Pertanian 1. Padi 2. Jagung 3. Cabe 4. Bawang Merah 5. Karet 6. Kelapa Sawit	144.300 Ton 123.136 Ton 2.370,10 Ton 11.231 Ton 15.182,30 Ton 52.920,21 Ton
2	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas	Nilai SAKIP	BB

d. Evaluasi Internal

Target kinerja tahun 2025 yang tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya.

Tabel Sasaran RPD dan Pencapaian IKU Tahun 2024					
No.	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Jumlah produksi pertanian (ton)			
		• Padi	144.300	169.270	117,30%
		• Jagung	123.136	123.739	100,49%
		• Bawang Merah	11,23	120	1068,57%
		• Cabe	2.370,10	2.857	120,54%
		• Karet	15.182,30	21.354	140,65%
		• Sawit	52.920,21	75.235	142,17%

Sumber Data : Distanhortbun 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat daerah : Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Produksi Pertanian 1. Padi 2. Jagung 3. Cabe 4. Bawang Merah 5. Karet 6. Kelapa Sawit	144.300 Ton 123.136 Ton 2.370,10 Ton 11.231 Ton 15.182,30 Ton 52.920,21 Ton

Pt. Inspektur,



Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009